



**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**

melalui pola pembangunan Semesta Berencana  
menuju **BALI ERA BARU**

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI BALI  
TAHUN 2019-2023**

**Jln Raya Puputan-Komplek Nitimandala  
Denpasar Bali (80235)  
Telp. (0361) 223096 Fax. (0361) 223095  
Website : [www.disperindag.baliprov.go.id/](http://www.disperindag.baliprov.go.id/)**



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



## KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayu Bagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat disusun sebagai implementasi penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan perindustrian dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Perindustrian dan Perdagangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dijabarkan sebagaimana mestinya.

Denpasar, April 2022  
Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Bali,



**I WAYAN JARTA**

NIP. 19641111 198603 1 023



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	13
2.2.2 Gambaran Keuangan .....	14
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.3.4 Kondisi Pelayanan.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>BAB III-3</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	36
3.3 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi .....	44



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Provinsi Bali .....	56
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN .....</b>	<b>112</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>114</b>



## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1 Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .....	13
Tabel 2.2 Kelompok Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2017 s/d 2021 .....	15
Tabel 2.4 PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2014 s/d 2021 .....	16
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2021 .....	19
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai <i>Data: Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2021</i> .....	20
Tabel 2.7 Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan Penolong Industri Besar Provinsi Bali .....	21
Tabel 2.8 Perkiraan Posisi Stok/Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Provinsi Bali Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2021 .....	23
Tabel 2.9 Koneksitas Barang-barang Kebutuhan Pokok (Oktober s/d Desember 2021) .....	24
Tabel 2.10 Transaksi Temu Dagang Komoditi Agro/Pasar Lelang Komoditas Agro .....	24
Tabel 2.11 Realisasi Penerimaan Pengujian Komoditi Hasil Pertanian/Perkebunan Tahun 2016 s/d 2021 .....	26
Tabel 2.12 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2017 – 2021 .....	26
Grafik 2.13 Realisasi Impor tahun 2017 – 2021 .....	28
Grafik 2.14 Neraca Perdagangan Bali Tahun 2017 s/d 2021 .....	29
Tabel 2.15 Pameran Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .....	29
Tabel 3.1 Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Tahun 2021 .....	46
Tabel 3.2 Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali .....	48
Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali Tahun 2017-2021 .....	49





Tabel 3.4. Nilai Ekspor Bersih Tahun 2016 – 2021 .....	49
Grafik 3.5 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah .....	52
Grafik 3.6 Tenaga Kerja Sektor Industri Bali .....	53
Grafik 3.6 Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri.....	53
Grafik 3.8 Data Industri Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2021 .....	54
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	57
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan RPJMD (Tabel 7.2B) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .....	58
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang secara langsung diampu pada misi 1, 16 dan 17 RPJMD	
Tabel 6.3 Semesta Berencana .....	59
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	63
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	66
Tabel 6.1 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 .....	70
Tabel 6.2 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2021-2023 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 .....	84
Tabel 6.3 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2020-2023 .....	94
Tabel 6.4 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2019 .....	105
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	113
Tabel 8.1 Daftar Revisi Renstra .....	115



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata sebagai sektor utama Provinsi Bali didukung sektor Industri dan Perdagangan, melalui produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh para pengerajin Bali yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Demikian juga dengan kebutuhan bahan-bahan pokok masyarakat dan wisatawan terjaga ketersediaannya di pasaran serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain mendukung potensi pariwisata Bali, dampak yang dihasilkan sektor pariwisata dapat meningkatkan nilai tambah produk sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam era globalisasi dimana perdagangan tanpa batas, baik waktu maupun tempat, berbagai permasalahan dihadapi oleh para perajin dan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk mengantisipasi isu strategis dalam era globalisasi diperlukan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang mampu menjawab tantangan dan peluang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan



melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar, (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya; dan (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini sangat penting bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disusun berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan telah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat





kaitannya dengan implemtasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi program/kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan dukungan dana APBD Provinsi Bali untuk mendukung mewujudkan janji Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 9) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



- 11) Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2005-2025
- 12) Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018 – 2023
- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- c. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- b. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;



- d. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan dalam pemahaman terhadap isi Rencana Strategis (Renstra) maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan perubahan renstra landasan hukum, maksud dan tujuan adanya renstra, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang berisi tugas dan fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan berkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yaitu berisi Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas Fungsi dan Pelayanan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Telaahan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, yang berisi tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

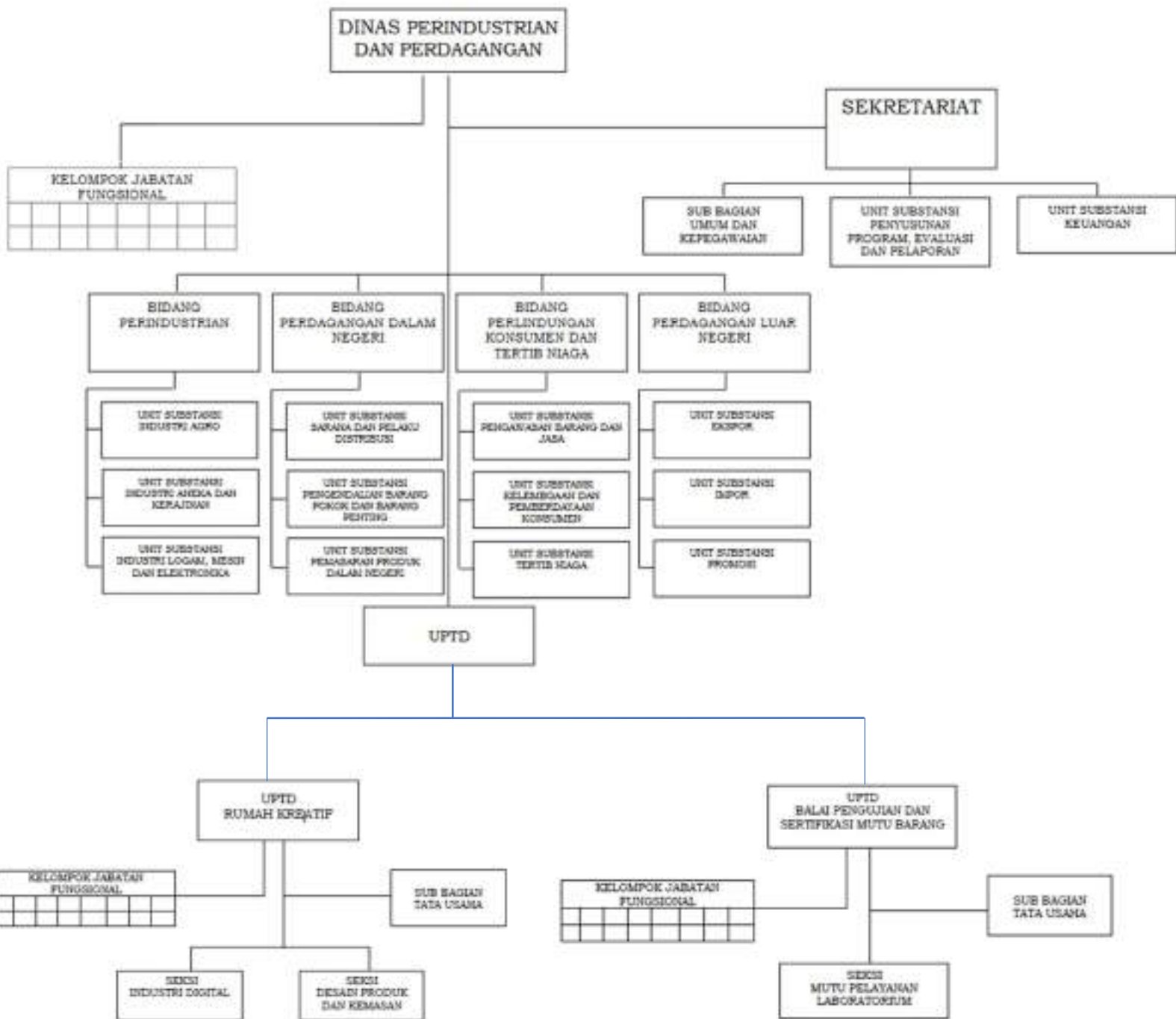
### PROVINSI BALI

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi , serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya” Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustriandan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, digambarkan sebagai berikut:







Adapun tugas pokok dan fungsi dari pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas:
  - a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
  - b) memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
  - c) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - Undangan;
  - d) menilai prestasi kerja bawahan;
  - e) menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  - f) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
  - g) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;
  - h) mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
  - i) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  - j) menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD Dinas;
  - k) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
  - l) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - m) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - n) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
  - o) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- p) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
  - q) melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
  - s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  - b) mengkoordinasikan program kerja bawahan;
  - c) mengkoordinasikan bawahan;
  - d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Perundang - undangan;
  - e) menilai prestasi kerja bawahan;
  - f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - h) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan industri;
  - i) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perindustrian;
  - j) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri;
  - k) melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;
  - l) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri Besar, penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Besar dan penerbitan rekomendasi Izin usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
  - m) melaksanakan Pengawasan standar produk industri;
  - n) melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri;
  - o) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya industri;
  - p) melaksanakan pembinaan produk industri;
  - q) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan bahan baku industri;
  - r) melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk industri;
  - s) melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengembangan industri;
  - t) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan untuk pengembangan industri;



- u) menyusun rekomendasi teknis bidang perindustrian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; melaporkan informasi industri untuk Izin Usaha
  - v) Industri (IUI) besar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
  - w) program perencanaan dan pembangunan industri;
  - x) program pengendalian izin usaha industri;
  - y) program pengelolaan sistem informasi Industri Nasional;
  - z) melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - aa) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - undangan; dan
  - bb) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas:
- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  - b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
  - c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  - d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
  - e) menilai prestasi kerjabawahan;
  - f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - h) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
  - i) membantu menyusun perumusan kebijakan dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
  - j) mengkoordinir pelaksanaan teknis dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
  - k) mengkoordinasikan pelaksanaan Pasar Lelang;
  - l) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, pelaku usaha distribusi dan sistem waralaba;
  - m) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;



- n) mengkoordinasikan fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;
  - o) menyusun rekomendasi teknis bidang perdagangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - p) mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan ketersediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida;
  - q) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  - b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
  - c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  - d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e) menilai prestasi kerja bawahan;
  - f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - g) mengkoordinasikan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - h) membantu Kepala Dinas menyusun perumusan kebijakan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga .
  - i) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan jasa;
  - j) Mengevaluasi penanganan pengaduan dan sengketa konsumen;
  - k) mengkoordinasikan kelembagaan dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  - l) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Kegiatan Perdagangan terhadap Penerapan tertib niaga, barang beredar dan jasa;
  - m) mengkoordinasikan kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
  - n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;



5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  - b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
  - c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  - d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
  - e) menilai prestasi kerjabawahan;
  - f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
  - h) membantu menyusun perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri;
  - i) pengkoordinasian perencanaan program perdagangan internasional;
  - j) perumusan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
  - k) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
  - l) pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan, promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
  - m) pembinaan dan pengawasan eksportir yang memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA);
  - n) pemberian Surat Keterangan Asal (SKA);
  - o) pengkoordinasian penggunaan Angka Pengenal Impor (API);
  - p) penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal daridaerah kabupaten/kota pada misi pameran dagang internasional;
  - q) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan, serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
  - r) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - s) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang –undangan;
  - t) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.





6. UPTD Rumah Kreatif, memiliki fungsi meliputi :
  - a) melaksanakan pendampingan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan mutu kemasan pada industri olahan pangan;
  - b) melaksanakan pendampingan dalam pengembangan bidang produksi dan legalitas usaha pada industri olahan pangan.
7. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, memiliki fungsi meliputi:
  - a) ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan pengawasan barang beredar di seluruh daerah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan konsumen; dan
  - b) ikut mengawal dan mengamankan regulasi pemerintah khususnya arus keluar masuk barang dalam kegiatan ekspor impor.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil yang mendukung tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam tahun 2021 berjumlah 119 orang. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

NO	KETERANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	6 orang
3	Pejabat Eselon IV	17 orang
4	Staf	43 orang
5	Fungsional	12 orang
6	CPNS	0 orang
7	Tenaga Honorer	0 orang
8	Tenaga Harian	0 orang
9	Tenaga Kontrak	40 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>119 orang</b>

*Sumber Data: Disperindag Bali*

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dikelompokkan sebagai berikut:



**Tabel 2.2**

Kelompok Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jml
1	Pasca Sarjana ( S2 )	21
2	Sarjana ( S1 )	38
3	SMA	18
4	SMP	1
5	SD	1

*Sumber Data: Disperindag Bali*

### **2.2.2 Gambaran Keuangan**

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD yang terdiri dari belanja langsung. Perkembangan realisasi anggaran APBD yang dipergunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja	16.144.117.148	17.154.136.384	19.046.176.095	18.085.477.506	23.790.389.630	14.445.771.950	15.075.578.520,	14.704.661.072	18.439.164.944	20.214.725.975	89,48	87,88	77,20	100%	84,97



### 2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari:

- 2.2.2.4.1 Pengujian mutu komoditi ekspor oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- 2.2.2.4.2 Tera/tera ulang (yang sejak bulan September 2016 pelaksanaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota).
- 2.2.2.4.3 Sewa Kantin.

Perkembangan PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2014 s/d 2021**

No.	TAHUN	PAD	KETERANGAN
		(Rp.)	
1.	2014	328.820.500	Target
2.	2015	340.224.500	
3.	2016	311.800.000	
4.	2017	26.000.000	
5.	2018	34.800.000	
6.	2019	38.300.000	
7.	2020	42.200.000	
8.	2021	40.500.000	

*Sumber Data: Disperindag Bali*

### 2.2.4 Kondisi Pelayanan

Potensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam upaya menumbuh kembangkan industri dan perdagangan di Provinsi Bali, antara lain:



### 2.2.3.1 Sarana dan prasarana

Perkembangan sektor perdagangan sangat terkait dengan perkembangan sektor industri, yang berarti sarana dan prasarana sektor industri juga merupakan sarana dan prasarana yang mempengaruhi sektor perdagangan. Adapun sarana dan prasarana sektor industri dan perdagangan di daerah Bali, antara lain:

#### a. Sarana distribusi perdagangan

Jumlah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern cukup memadai. Pasar merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan, karena merupakan tempat bertemunya para penjual maupun pembeli. Jumlah pasar yang ada di Bali tahun 2020 sebanyak 1.353 buah, dengan rincian, sebagai berikut: Pasar tradisional sebanyak 355 buah dan Pasar Modern (Berjejing dan Non Jejing), sebanyak 998 buah.

#### b. Pelaku usaha ekspor dan impor Jumlah eksportir Daerah Bali tahun 2021 sebanyak 593 eksportir dan jumlah importir sampai dengan bulan juli 2021 sebanyak 192 importir.

#### c. Sentra industri

Jumlah sentra industri Kecil Menengah di Bali tahun 2017 sebanyak 564 sentra dengan jumlah tenaga kerja yg terserap 62.948 orang.

#### d. Produk unggulan

Pemerintah telah menetapkan 10 produk utama, 10 produk potensial dan 3 kelompok jasa yaitu :

- 1) Sepuluh produk utama, yaitu Udang, Kopi, Minyak kelapa sawit, Biji coklat/kakao, Karet dan produk karet, tekstil dan produk tekstil, Alas kaki, Elektronik, Komponen kendaraan bermotor, Furniture. Sedangkan 10 produk unggulan Daerah Bali, yaitu Tekstil dan produk tekstil, Ikan dalam kaleng, Kerajinan kayu, Kerajinan perak, Furniture, Kopi, Panili, Ikan tuna, Komoditas lainnya, Rumput laut.
- 2) Sepuluh produk potensial, yaitu: Kerajinan, Ikan dan produk ikan, Tanaman obat, Kulit dan produk kulit, Makanan olahan, Perhiasan, Minyak atsiri, Rempah- rempah, Peralatan kantor bukan kertas,





Peralatan kesehatan. Produk potensial untuk daerah Bali yaitu Kerajinan dan Perhiasan.

3) Tiga kelompok Jasa, yaitu Konstruksi, Teknologi informasi, Tenaga kerja.

e. Pemasaran

Sampai dengan tahun 2021 ekspor Daerah Bali telah menembus 104 negara tujuan ekspor dengan 10 negara tujuan ekspor adalah : 1.USA 2.Australia ,3.Japan,4.China,5.France, 6.Taiwan,7.England,8.Germany, 9.Canada ,10.Spain. Disamping potensi pasar ekspor, Bali juga merupakan pasar domestik yang potensial, karena Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia yang dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara serta wisatawan nusantara. Selain itu Bali merupakan tempat/etalase barang kerajinan daerah lain di Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk mendapatkan berbagai ragam barang dari berbagai daerah di Indonesia.

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Sampai Dengan Tahun 2021 : Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2021 diukur dengan cara membandingkan antara pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Relisasi		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya daya saing produk industri Bali	Meningkatnya Produktifitas Industri	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	6,04%	6,04%	6,04%
2	Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri yang Berkualitas	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	25%	25%	30%
		Meningkatnya Pasar yang Berkualitas	Jumlah pasar yang ber SNI	0	0	2
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	2%	2%	2%
3	Terwujudnya stabilitas harga barang pokok	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Pokok	Persentase Peningkatan Harga Barang Pokok	<10%	<10%	<10%
4	Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	-39,85%	-21,55%	3%

Gambaran umum kondisi kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Sebagai Berikut :

#### **A. Bidang Perindustrian**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Industri Provinsi Bali diantaranya melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi dan pendampingan sertifikasi (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu & Hak Kekayaan Intelektual) serta promosi melalui pameran. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Jumlah unit usaha tahun 2016 sebanyak 12.730 unit usaha, meningkat menjadi 16.385 unit usaha (28,71%) pada Tahun 2021
- b. Jumlah tenaga kerja sektor industri Bali setiap tahun mengalami peningkatan.



- Tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 96.601 orang meningkat menjadi 137.522 orang pada tahun 2021 (42,36%)
- c. Nilai inventasi industri Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Perkembangan nilai investasi dari tahun 2016 Rp. 3.392.041.722.000 meningkat menjadi Rp. 4.313.591.500.000 pada tahun 2021 (27,16%)
  - d. Nilai produksi industri Provinsi Bali tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Perkembangan nilai produksi dari tahun 2016 sebanyak Rp. 7.183.291.023.000 meningkat menjadi Rp. 9.629.811.987 pada tahun 2021 (30.05%)
  - e. Pada tahun 2021 jumlah Pelaku Usaha Industri yang Telah di Fasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui quota klinik HKI Kemenperin sebanyak 29 Merk dagang, Hak Cipta sebanyak 28 Judul Cipta sedangkan Desain Industri Sebanyak 13 Judul/Jenis Karya yang di daftarkan.
  - f. Pada tahun 2021 untuk meningkatkan mutu perajin arak bali dalam rangka implementasi pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali maka diberikanlah Bantuan peralatan Destilasi arak bali kepada kelompok petani arak sebanyak 10 leompok.

Adapun perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produk industri kecil dan menengah provinsi Bali tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi,  
Nilai Data: *Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2021*

No	Tahun	Unit Usaha	Tng kerja (orang)	Nilai Investasi ( Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong (Rp.000)
1	2016	12.730	96.601	3.392.041.722	7.183.291.023	3.893.799.198
2.	2017	14.992	103.969	4.062.885.917	9.172.943.045	4.098.246.861



No	Tahun	Unit Usaha	Tng kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong (Rp.000)
3.	2018	15.216	104.193	4.066.078.917	9.176.136.045	4.098.843.362
4.	2019	15.884	104.417	4.066.398.819	9.271.813.267	4.151.346.693
5.	2020	16.143	125.855	4.288.739.749	9.272.403.267	4.151.641.693
6.	2021	16.385	137.522	4.313.591.500	9.629.811.987	4.213.570.454

\*\* Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali

Sedangkan jumlah industri besar di Bali yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berjumlah 57 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.318 orang dengan nilai investasi, nilai produksi secara rinci seperti tabel di bawah ini

Tabel 2.7

Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan Penolong Industri Besar Provinsi Bali

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	NILAI BAHAN BAKU (Rp.)
1	KABUPATEN JEMBRANA	1	236	16.000.000.000	1.841.703.942	613.901.314
2	KABUPATEN TABANAN	10	957	256.318.352.646	82.321.689.448	47.858.739.991
3	KABUPATEN BADUNG	9	2.515	595.549.676.000	615.869.039.769	363.590.219.876
4	KOTA DENPASAR	18	5.186	419.290.231.894	461.471.932.908	284.067.784.448
5	KABUPATEN GIANYAR	13	991	349.351.593.557	229.796.144.097	103.609.266.576
6	KABUPATEN BANGLI	3	156	48.500.000.000	125.968.000.000	45.196.000.000
7	KABUPATEN BULELENG	2	277	33.000.000.000	18.600.000.000	11.800.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>	<b>10.318</b>	<b>1.718.009.854.097</b>	<b>1.535.868.510.164</b>	<b>856.735.912.205</b>

Data: Sumber Data: Disperindag Bali



## **B. Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian usaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri dan perlindungan konsumen. Kegiatan bidang perdagangan dalam negeri diarahkan pada upaya memperlancar distribusi, keamanan stok barang kebutuhan pokok dan penting, stabilisasi harga serta pemasaran produk dalam negeri. Pelaksanaan peran bidang perdagangan dalam negeri tersebut, adalah sebagai berikut:

### **1. Distribusi dan Pemasaran**

Berbagai langkah dilakukan dalam pengaturan mekanisme distribusi barang sehingga tercipta kelancaran dalam distribusi dan tidak terjadi stagnan dalam perdagangan akibat ketidaklancaran distribusi. Langkah- langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan prognosa terhadap ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting.
- b. Pembinaan kepada distributor dan pemilik gudang untuk menjaga keamanan stok/ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting serta pembinaan kepada pengelola pasar.
- c. Melakukan monitoring harga barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
- d. Melakukan koordinasi ketersediaan, kelancaran distribusi dengan instansi teknis terkait.
- e. Menjaga stabilitas harga melalui kegiatan pasar murah/operasi pasar yang dilaksanakan pada daerah yang padat penduduk dan daerah yang kurang sejahtera serta berperan aktif sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pada Periode Bulan Juli s/d Desember 2020 Perkiraan posisi stok/ ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 2.8**  
Perkiraan Posisi Stok/Ketersediaan Bahan Pangan  
Pokok Provinsi Bali Bulan Oktober s/d Desember Tahun  
2021

No	Jenis Komoditi	Satuan	Perkiraan Stok Dalam 3 Bulan	Kebutuhan Perbulan	Ketahanan Stok Dalam Bulan
1	BERAS	TON	177.005	33.742	5,2 bulan
2	GULA PASIR	TON	13.825	4.175	3,3 bulan
3	MINYAK GORENG	TON	12.099	3.583	3,4 bulan
4	TEPUNG TERIGU	TON	5.500	1.500	3,7 bulan
5	DAGING SAPI	TON	2.688	245	11 bulan
6	DAGING AYAM RAS	TON	25.566	3.217	7,9 Bulan
7	TELUR AYAM RAS	TON	15.112	2.477	6,1 bulan
8	KACANG KEDELAI	TON	4.913	1.200	4,1 bulan
9	BAWANG MERAH	TON	7.577	1.524	5 bulan
10	BAWANG PUTIH	TON	3.868	1.054	3,7 bulan
11	CABE BESAR	TON	2.208	446	5 bulan
12	CABE RAWIT	TON	5.607	983	5,7 bulan

*Data perkiraan posisi stok Bulog, Disnak Prov Bali tahun 2021*

Koneksitas barang kebutuhan pokok masyarakat dengan Provinsi lain dalam kurun waktu bulan Juli s/d Desember 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 2.9**  
Koneksitas Barang-barang Kebutuhan Pokok  
(Oktober s/d Desember 2021)

	Jenis Komoditi	Volume 3 bulan (Ton)	Asal kedatangan
1.	Beras	<b>9.000</b> ton	Jawa Timur- Distributor/ Pedagang besar
2.	Gula pasir	<b>12.825</b> ton	– pengecer
3.	Tepung terigu	4.500 ton	Jawa Timur/ NTB – Distributor/ Pedagang
4.	Minyak Goreng	10.050 ton	– Pengecer
5.	Kedelai	3.600 ton	Jawa Timur- Distributor/Sub distributor –
6.	Bawang Merah	1.800 ton	Pengecer
7.	Bawang Putih	3.240 ton	Jawa Timur – Depo – Distributor – Pedagang
			Pengecer
			Jatim – Distributor – Pedagang Pengecer –
			Kerajinan Tahu Tempe – Konsumen
			Bima – Distributor /Pasar Galiran – Pedagang
			Pengecer
			Jatim – Distributor /Pasar Galiran – Pedagang
			Pengecer

*Sumber Data: Disperindag Bali*

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemasaran produk/barang dalam negeri melalui:

- Sosialisasi cinta penggunaan produk dalam negeri.
- Mengikuti pameran dagang di beberapa daerah.
- Menyelenggarakan Pasar Lelang, pada penyelenggaraan tanggal 4 Juli 2019 di Soropadan, komoditi dari Bali yang terjual seperti berikut:

**Tabel 2.10**  
Transaksi Temu Dagang Komoditi Agro/Pasar Lelang  
Komoditas Agro

No	Penjual	Pembeli	Komoditi	Volume	Satuan	Nilai Transaksi (Rp)
1.	I Made Sianta	Mudjiati (Pekalongan)	Cengkeh	6	Ton	492.000.000
2.	I Made Sujana	Kamsuni (Pati)	Jeruk Siam	6	Ton	42.000.000
Jumlah						534.000.000

*Sumber Data: Disperindag Bali*



d. Kerjasama dengan pasar swalayan/toko modern

### C. Perdagangan Luar Negeri

Pelayanan publik yang dilaksanakan pada Bidang Perdagangan Luar Negeri yaitu:

a. Ekspor :

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
2. Rekomendasi eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK)
3. Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
4. Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK)
5. Rekomendasi ekportir terdaftar kopi (ETK)

b. Impor :

Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sampai dengan 2 Februari 2015. Mulai 3 Februari 2015 pelayanan penerbitan angka importir diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Pelayanan Pengujian Mutu Barang.

Pelayanan dilaksanakan oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendukung ekspor komoditi agro yang diekspor. Laboratorium sudah terakreditasi dengan ruang lingkup komoditi kopi, vanili dan kakao. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan ekspor khususnya komoditi agro antara lain: Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen serta Pengembangan Laboratorium Penguji Mutu Barang, kedepannya diharapkan mampu melakukan pengujian terhadap produk-produk beredar yang wajib SNI dalam rangka melindungi konsumen serta produk-produk ekspor lainnya yang dipersyaratkan untuk pengujian (produk-produk kerajinan perak/ poduk unggulan ekspor). Adapun realisasi penerimaan pengujian komoditi hasil pertanian/perkebunan lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.11**  
Realisasi Penerimaan Pengujian Komoditi Hasil  
Pertanian/Perkebunan Tahun 2016 s/d 2021

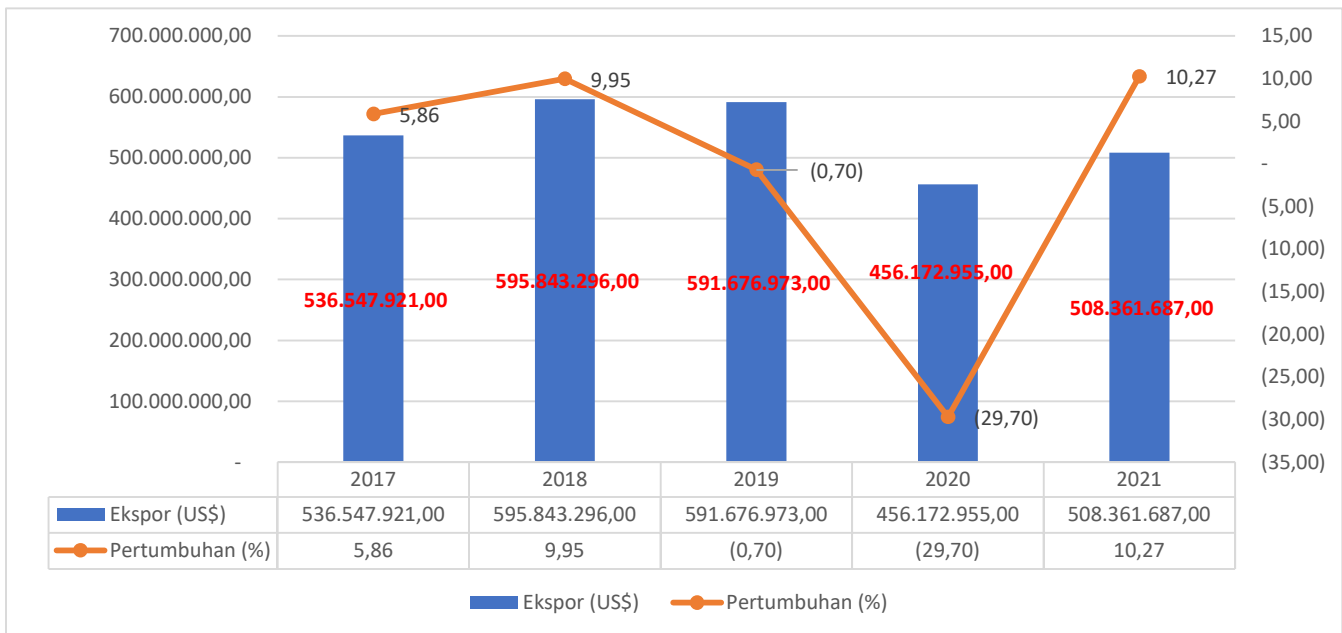
NO	JENIS PENERIMAAN	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Pengujian komoditi hasil pertanian/ perkebunan	22.800.000	31.200.000	33.600.000	42.200.000	36.900.000

Sumber Data: Disperindag Bali

Berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Bidang Perdagangan Luar Negeri sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Realisasi ekspor non migas daerah Bali berdasarkan data BPS Provinsi Bali yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif perkembangan pertahunnya. Adapun perkembangan realisasi ekspor Non Migas daerah Bali dari Tahun 2017- 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Grafik 2.12**  
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2017 – 2021



Sumber Data: BPS Provinsi Bali



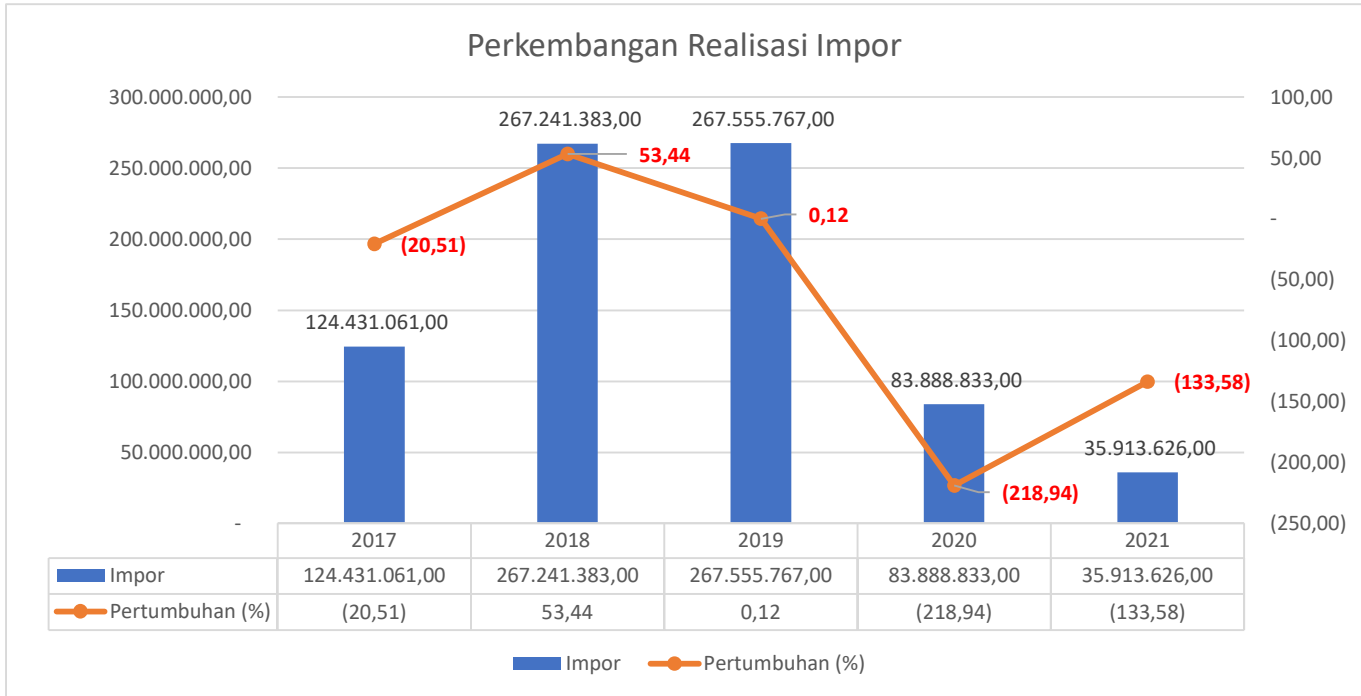
Berdasarkan jenis komoditi, ekspor Bali dikelompokkan menjadi 5 kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Hasil Kerajinan, berupa : Kerajinan kayu, kerajinan furniture, kerajinan perak, kerajinan bambu, kerajinan logam, kerajinan rotan, kerajinan terracota, kerajinan kulit, kerajinan batu padas, kerajinan anyaman, kerajinan keramik, kerajinan kerang, kerajinan lukisan, kerajinan alat tulis.
- 2) Kelompok Hasil Industri, berupa: Tekstil dan produk tekstil, sepatu, tas, ikan dalam kaleng, dan komponen/rumah jadi.
- 3) Kelompok Hasil Pertanian, berupa: ikan tuna, ikan kerapu, lobster, ikan hias hidup, ikan nener, ikan kakap, ikan ikan lainnya, kepiting, sirip ikan hiu, buah-buahan, burung hidup, rumput laut.
- 4) Kelompok Hasil Perkebunan, berupa: panili dan kopi
- 5) Lain-lain

Dalam rangka *Nasional Single Window* dan *ASEAN Single Window* di Indonesia telah ditetapkan 85 Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yaitu antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan tahun 2021 mencapai 18.127 SKA dengan jumlah eksportir sebanyak 413 eksportir. Daerah Bali melakukan impor komoditi, yaitu barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal berasal dari 21 negara dengan Realisasi impor Bali dan kontribusi masing- masing kelompok komoditi impor terhadap total impor, selama 5 tahun, seperti tabel berikut:



**Grafik 2.13**  
**Realisasi Impor tahun 2017 – 2021**



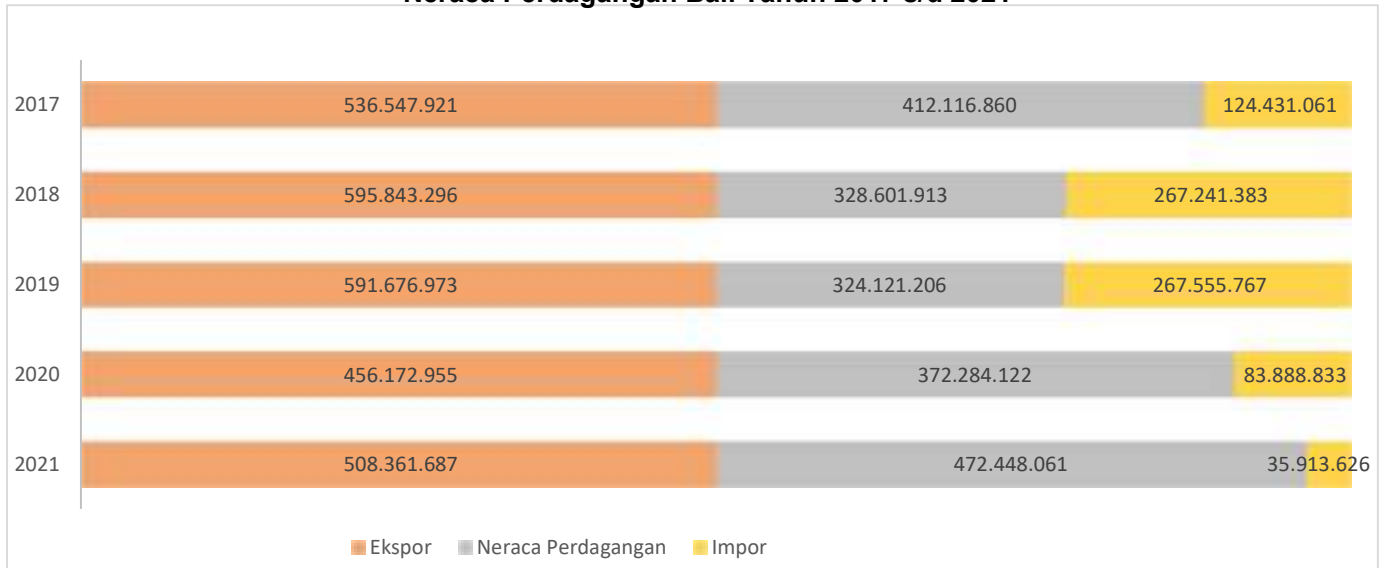
*Sumber Data: BPS Provinsi Bali*

Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat, positif dan negatif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Yang dimaksud ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara, impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Neraca perdagangan provinsi bali digambarkan sebagai berikut :



**Grafik 2.14**

**Neraca Perdagangan Bali Tahun 2017 s/d 2021**



*Sumber Data: Disdagperin Provinsi Bali*

- a. Kegiatan Fasilitasi Promosi melalui pameran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2021 Sebagai Berikut :

**Tabel 2.15**

**Pameran Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

No	Nama Pameraan	Tanggal	Lokasi
1	Gelar Produk DEKRANADA	Januari s/d Desember 2021	Bandara Ngurah Rai Bali
2	Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 1	1 Pebruari s/ 31 Maret 2021	Art Center
3	Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 2	27 April s/d 6 Juni 2021	Art Center
4	Pameran Seni Rupa	7 s/d 21 Juni 2021	Online Balimall.id
5	Pameran IKM Goes To Mall Plaza Renon	10 juni s/d 30 juni 2021	Plaza Renon





No	Nama Pameran	Tanggal	Lokasi
6	Pameran IKM Bali Bangkit PKB	12 Juni s/d 10 Juli 2021	Art Center
7	Pameran DERANASDA HUT BKN	30 Juni s/d 1 Juli 2021	Westin Nusa Dua
8	Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 3	15 September s/d 14 Oktober 2021	Art Center
9	Pameran IKM Goes To Mall Plaza Renon	22 september s/d 22 oktober 2021	Plaza Renon
10	Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 4	19 Oktober s/d 17 Nopember 2021	Art Center
11	Pameran IKM Goes To Mall Beachwalk	7 oktober s/d 21 oktober 2021	Beachwalk
12	Pameran IKM Goes To Mall Beachwalk	22 oktober s/d 7 november 2021	Beachwalk
13	Pameran IKM Goes To Mall Plaza Renon	23 oktober s/d 22 november 2021	Plaza Renon
14	Pameran IKM Goes To Mall Level 21	18 november s/d 21 november 2021	Level 21 Mall
15	Pameran IKM Goes To Mall Plaza Renon	23 november s/d 23 desember 2021	Plaza Renon
16	Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 5	25 Nopember s/d 24 Desember 2021	Art Center
17	Pameran Online Rumah Kriya Asri (LIKUPANG)	29 Nopember s/d 18 Desember 2021	Rumah Kriya DEKRANASDA

*Sumber Data: Disperindag Bali*

#### **D. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan 2 (dua) hal/kegiatan yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena dua hal ini sangat menentukan tingkat ketertiban dan kepuasan konsumen terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, yaitu pengamanan pasar dalam negeri melalui sistem pengawasan terhadap barang yang beredar serta jasa secara konsekuen dan berkelanjutan, seperti penerapan label yang benar, cara menjual yang tidak merugikan konsumen, adanya fasilitas purna jual sesuai dengan yang diiklankan.



Pengawasan terhadap barang yang beredar utamanya barang yang wajib SNI pada tahun 2021 yaitu berupa kabel listrik, accu, tepung terigu, regulator, helm, mainan anak, semen, lampu hemat energy (LHE), ban, closet duduk, air minum dalam kemasan, tusuk kontak yang bertujuan agar konsumen menggunakan produk yang benar-benar aman dan bermutu sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah barang beredar wajib SNI yang diawasi pada tahun 2021 .

Untuk barang-barang elektronik seperti dispenser, kipas angin, blender, penanak nasi serbaguna, mesin cuci, pompa air listrik harus dilengkapi dengan petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi yang bertujuan agar konsumen memahami cara penggunaan barang tersebut sehingga penggunaan barang tersebut tidak menimbulkan dampak buruk pada konsumen atau membahayakan konsumen seperti terjadinya kebakaran. Dengan adanya kartu garansi, konsumen dapat mengetahui kekuatan barang elektronik yang dibelinya. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dengan diadakannya pengawasan, maka akan tercipta dunia usaha yang kondusif, dimana para pelaku usaha akan menjual produk yang aman dan bermutu serta produsen akan memproduksi barang yang bermutu pula. Sehingga produk-produk dalam negeri mempunyai daya saing yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya pemasaran produk dalam negeri.

Selain pengawasan terhadap barang yang beredar sesuai SNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali juga memfasilitasi/ memediasi pengaduan konsumen. Pada tahun tahun 2019 sampai tahun 2020 telah dilakukan mediasi terhadap dua puluh dua pengaduan. Terkait dengan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan berusaha, maka pada tahun 2020 telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha di Bali dengan harapan pelaku usaha tersebut taat kepada peraturan yaitu memiliki ijin usaha perdagangan. Dengan memiliki ijin usaha, maka pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan dan memfasilitasi untuk meningkatkan usaha.



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

### A. TANTANGAN ANCAMAN (THREAT)

- a) Banyaknya produk luar masuk ke Bali dengan desain yang sama dan harga yang lebih murah
- b) Terjadinya pemalsuan produk tenun asli bali.
- c) Semrawutnya pasar tradisional yang terkesan kumuh.
- d) Akan terjadi persaingan yang ketat dalam era perdagangan bebas.
- e) Masih terdapat hambatan tentang tarif dan non tarif diberapa negara tujuan utama ekspor.
- f) Munculnya kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia seperti China, India, Thailand, Vietnam dan lain-lain yang akan menjadi kompetitor kita di pasar internasional.
- g) Isu penenaan label lingkungan (*ecolabeling*) terutama pada produk-produk berbahan baku kayu
- h) Belum bergairahnya perekonomian di sektor riil.
- i) Infrastruktur belum memadai, yaitu pelabuhan laut Benoa belum dapat berfungsi secara maksimal untuk pelabuhan ekspor.
- j) Implementasi Undang-Undang Investasi belum maksimal dan Undang- Undang Ketenagakerjaan belum terpecahkan.
- k) Regulasi yang menghambat iklim investasi.
- l) Daya saing beberapa produk rendah.



- m) Pasar Tradisional kalah bersaing dengan Pasar Modern
- n) Banyaknya tumbuh pasar berjejaring
- o) Kebutuhan barang pokok bergantung dari luar Bali

#### **B. PELUANG (OPPORTUNITY)**

- a) Mempunyai segmen pasar yang berbeda
- b) Industri kecil kerajinan yang berorientasi ekspor lebih banyak menggunakan bahan baku lokal.
- c) Perkembangan sektor Pariwisata dapat meningkatkan pasar dan sekaligus sebagai sarana promosi hasil-hasil Industri kecil dan Menengah.
- d) Globalisasi perekonomian dapat membuka peluang pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah.
- e) Keunggulan produk yang dihasilkan oleh Industri kecil dan menengah yang bercorak khas budaya Bali.
- f) Masih diberikannya GSP dari beberapa negara maju kepada negara berkembang termasuk Indonesia.
- g) Terbukanya peluang ekspor karena beberapa produk China dan Vietnam terkena restriksi di pasar utama (Amerika dan Uni Eropa).
- h) Banyaknya kesepakatan regional dan bilateral yang sudah terealisasi.
- i) Masih terbukanya pasar Non tradisional untuk produk-produk dari Bali antara lain : Negara Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan dan lain-lain.
- j) Rencana pembangunan Bali Trade Centre sebagai tempat promosi bersama.
- k) Meningkatkan standarisasi pasar ber-SNI



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yaitu melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah; melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya. Serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Permasalahan Bidang Perdagangan

1. Masih banyak pasar yang terkesan kumuh
2. Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
3. Kurangnya Pelayanan kepada pelanggan
4. Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
5. Belum optimalnya menggunakan *E-Monney*
6. Display barang kurang menarik
7. Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk
8. Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok



9. Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk local
10. Masih rendahnya permodalan
11. Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
12. Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar
13. Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
14. Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil peruntungan perdagangan
15. Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
16. Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor
17. Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang
18. Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang
19. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
20. Belum terbentuknya BPSK
21. Masih rendahnya edukasi konsumen tentang hak nya

#### Permasalahan Bidang Perindustrian

1. Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
2. Keterbatasan bahan baku industri
3. Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
4. Jumlah produksi masih rendah
5. Penguasaan teknologi produksi masih rendah
6. Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
7. masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk
8. Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK
9. Kemasan produk masih belum sesuai standar
10. Kurangnya Inovasi desain produk
11. Kurangnya pendampingan
12. Kurangnya komitmen menjalankan usaha/ Jiwa Kewirausahaan
13. Kurangnya kesadaran tentang HKI





### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali tahun 2018-2023 disebutkan bahwa Visi Pemerintah Provinsi adalah; Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dilandasi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala- Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”, maka rumusan Misi Pemerintah Provinsi Bali dalam tahun 2018 – 2023 ditetapkan sebagai berikut :

- Pertama : Memastikan terpenuhinya secara mandiri kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
- Kedua : Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan secara terintegrasi
- Ketiga : Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas termasuk pendidikankeagamaan
- Keempat : Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu memiliki jati diri,



- berintegritas dan berkualitas yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali
- Kelima : Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya
- Keenam : Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara *sakala dan niskala* berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kerthi* yaitu *Atma Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi*.
- Ketujuh : Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan fungsi: *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* dengan awig-awig dan pararem; melestarikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya; dan pengembangan perekonomian rakyat
- Kedelapan : Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat serta promosi pariwisata yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali serta meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif
- Kesembilan : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru, industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding Bali*) sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas
- Kesepuluh : Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
- Kesebelas : Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.



- Kedua belas Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.
- Ketiga belas Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se- Bali.
- Keempat belas Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
- Kelima belas Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif.
- Keenam belas Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
- Ketujuh belas Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding Bali*) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
- Kedelapan belas Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
- Kesembilan belas Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan
- Kedua puluh Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
- Kedua puluh satu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, **hijau, indah, dan bersih**



- Kedua puluh dua      Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah

Sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengampu misi keenam belas yaitu: membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas dan misi ketujuh belas yaitu: membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding* Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali. Serta mendukung misi pertama yaitu: memastikan terpenuhinya secara mandiri kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diperlukan :

Peningkatan Fasilitasi sarana dan prasarana, peningkatan jaringan bisnis dan pemasaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, dan peningkatan kolaborasi antar stakeholder yaitu Pemerintah, masyarakat/pelaku usaha/asosiasi, dan akademisi.

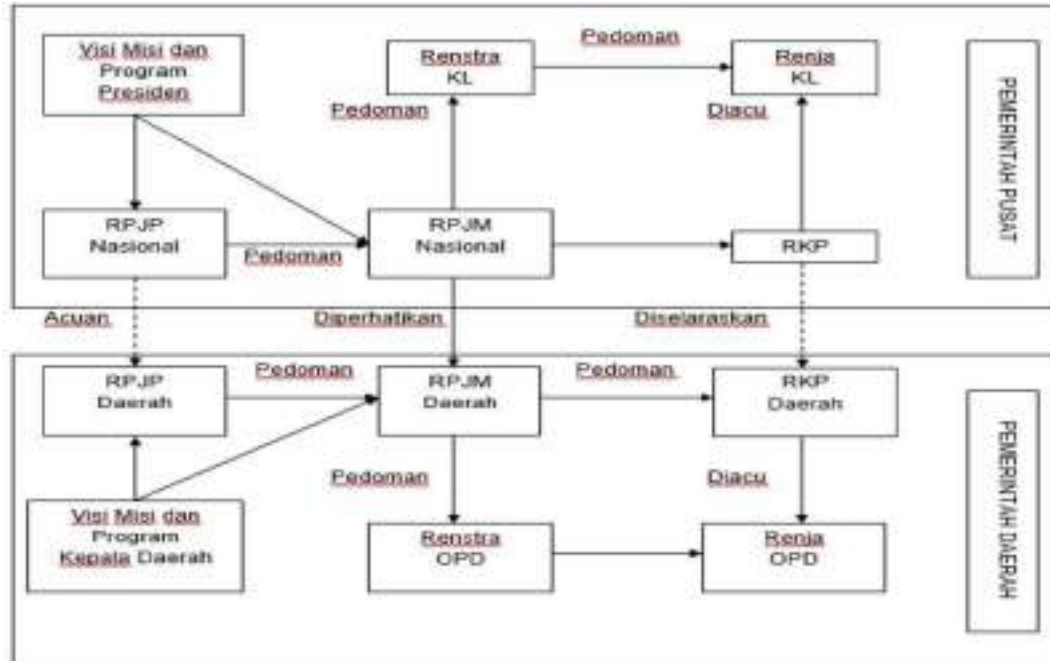
### **3.3. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga demikian juga dengan program K/L mendukung pembangunan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas



Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

Secara Umum sinergitas antara Renstra K/L dengan Restra OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada RPJMN (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut



Kementerian perindustrian melaksanakan 1 (Satu) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas. Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020-2024 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain :

- a) Terwujudnya tata kelola kementerian yang efektif dan efisien
- b) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
- c) Terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri

Sebagai salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian nasional, peran sektor perdagangan akan semakin penting dalam mendorong perbaikan iklim perdagangan dalam negeri dan pertumbuhan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian perdagangan.

sebagai Pembina sektor perdagangan telah menyusun Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang mendukung sasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional, meminimalisasi dampak globalisasi, dan mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2020-2024 difokuskan pada 4 (Empat) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu:

1. Menata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan;
2. Mengarusutamakan Sinergitas Kinerja Lintas Pemangku Kepentingan
3. Meningkatkan Profesionalitas SDM Kementerian Perdagangan di Era Revolusi Industri 4.0; dan





4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Decision Support dan Pelayanan Publik.

Ke Empat misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan dan 7 sasaran Strategis yang meliputi sektor perdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negeri, dan sektor penunjang. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, kementerian perdagangan memiliki 12 arah kebijakan, yaitu :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional;
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
5. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen;
6. Peningkatan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab melalui Penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu, dan Tertib Ukur;
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima;
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian; dan
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perdagangan 2020-2024 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain :

- a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa
- b) Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggungjawab
- c) Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih,



Akuntabel, Dan Professional

d) Meningkatkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
Perdagangan

Analisis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran visi misi Kepala Daerah. Pada pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebelumnya terdapat beberapa faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akses-akses pasar baru untuk meningkatkan nilai ekspor
- Keterbatasan Sumber Daya Alam, kreativitas serta penguasaan teknologi
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung pertumbuhan industri semakin berkurang karena berkurangnya minat Kualitas produk, harga
- Perubahan selera konsumen yang semakin cepat sehingga dituntut untuk terus berinovasi
- Peningkatan dan pengembangan pasar untuk menjadi pasar yang ber- SNI sehingga memacu minat beli masyarakat ke pasar tradisional
- Peningkatan jumlah toko-toko krama bali, untuk memasarkan produk lokal Bali

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana) dengan Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung keharmonisan alam Bali, sumber daya manusia Bali dan budaya Bali



### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan bidang industri dan perdagangan, Isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

#### 1. Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal

Perkembangan desain produk fashion yang sangat cepat sesuai dengan selera pasar, menuntut para perajin/UKM untuk terus-menerus mengembangkan kreatifitas sehingga dapat memenuhi keinginan pasar. Untuk meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produk lokal utamanya busana Bali sesuai dengan Visi Nangun Sat kerthi Lokal Bali, dikeluarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dengan diimplementasikan Pergub tersebut, maka dapat memberikan peluang pasar bagi para perajin Bali untuk meningkatkan produksinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perajin krama Bali khususnya perajin tenun. Saat ini pemasaran produk lokal Bali, selain tenun juga mengalami hambatan, karena membanjirnya produk-produk import dengan harga yang lebih murah. Sedangkan produk-produk Bali memiliki ciri khas tersendiri/unik yang dibuat berlandaskan seni dan budaya. Agar produk-produk krama Bali dapat bersaing dan terserap dipasar, hal ini didukung dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Toko sandang lokal Bali merupakan salah satu dari sarana perdagangan produk busana/sandang di daerah Bali, dalam rangka memudahkan akses pemasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemasaran produk lokal Bali, sangat penting bagi pemerintah untuk mulai dalam upaya memperkenalkan secara proaktif kepada masyarakat luas bahwa produk/kriya yang dihasilkan oleh para UKM Bali tidak kalah dengan produk luar (import), untuk itu diharapkan kepada pelaku usaha pada Toko Swalayan dapat membantu memasarkan produk – produk lokal Bali, dengan melakukan kesepakatan/kerjasama pemasaran antara Toko Swalayan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga dapat meningkatkan pengembangan kemitraan dan tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan



produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

## 2. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok

Kebutuhan Pokok adalah merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti : dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok mencapai **yaitu 3,2 %**. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2021 menetapkan sasaran strategis Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan data yang di rilis BI Bali Sampai dengan akhir tahun 2021, secara kumulatif Provinsi Bali **mengalami inflasi 2,07%**, Inflasi Bali terjadi karena beberapa komoditas yang mendukung antara lain : canang sari, minyak goreng, angkutan udara, cabai rawit, tongkol diawetkan, daging babi, rokok kretek filter, pepaya, tempe, sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan deflasi yang terjadi di beberapa komoditas, antara lain : bawang merah, cabai merah, tomat, bahan bakar rumah tangga, sekolah menengah atas, popok bayi sekali pakai/diapers, mainan anak, baju kaos berkerah pria, mobil, dan bawang putih menahan laju peningkatan inflasi Bali yang lebih tinggi. Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar Sepanjang tahun 2021.

3. Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali capaian kinerja mencapai 100% dimana Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok 3,2 %. yang berarti di bawah dari 10%. Seperti di gambarkan pada tabel berikut :



**TABEL 3.1**  
**PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2021**

NO	KOMODITI	Satuan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nop	Des	Standar Deviasi	rata-rata	Kovar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Beras Premium	kg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	9.000	-
2	Gula pasir	kg	13.000	13.000	12.850	12.609	12.500	12.500	12.417	12.333	12.333	12.450	12.600	12.500	236	12.591	1,9
3	Minyak Goreng	kg	12.600	12.600	12.600	12.600	12.960	13.500	13.500	13.668	14.100	15.705	17.088	17.700	1.800	14.052	12,8
4	Daging sapi paha belakang	kg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.267	102.333	671	100.217	0,7
5	Daging ayam ras/Broiler	kg	36.425	33.358	34.533	41.271	37.513	34.717	29.729	31.377	36.608	36.025	34.973	35.430	2.940	35.163	8,4
6	Telur ayam ras / Broiler	kg	25.557	23.947	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.013	21.867	22.059	22.637	1.025	23.590	4,3
7	Susu kental manis Indomilk	385 gr	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	11.000	-
8	Jagung lokal pipilan kering	kg	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-
9	Terigu Segitiga Biru	kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000	--
10	Kedelai lokal	kg	10.917	11.000	11.440	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	416	11.780	3,5
Rata-Rata															709	22.811	3,2
Capaian Kinerja %																	147

*Sumber Data: Disperindag Bali*

Pasar rakyat merupakan suatu infrastuktur ekonomi daerah yang mempunyai fungsi strategis, yaitu diantaranya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha kecil, dan menengah. Pasar rakyat yang disebut juga sebagai pasar tradisional yang mana di dalamnya terdapat pedagang-pedagang yang sebagian besar termasuk dalam keluarga ekonomi menengah ke bawah, yang saat ini mengalami penurunan perekonomian yang sangat drastis karena kalah bersaing dengan pasar modern, hal ini disebabkan kondisi pasar yang kumuh dan kotor dinilai menjadi suatu hal yang harus segera diperbaiki, sehingga pasar tradisional menjadi bersih dan pengunjung merasa nyaman untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Modal utama yang dimiliki oleh pasar tradisional adalah masih adanya sistem tawar-menawar dengan harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pasar modern. Oleh karena itu pasar tradisional harus diaktifkan dan diberdayakan kembali secara berkelanjutan.

Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadikan pasar sebagai



tempat jual beli yang bersih, lengkap dan kompetitif sehingga tidak kalah dengan pasar modern. Hal tersebut akan membuat para konsumen menyambut baik pasar yang lebih bersih dan rapi dengan harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar modern.

Dalam program revitalisasi pasar ini, Presiden Jokowi menerapkan acuan standar dalam pasar rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. SNI Pasar Rakyat ini merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada Tahun 2015. Berdasarkan SNI 8152: 2015 Pasar Rakyat, terdapat 3 persyaratan pasar rakyat yang meliputi persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan. SNI Pasar Rakyat disusun sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat, sehingga Pasar Rakyat dapat dikelola secara professional, memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk terciptanya pasar rakyat yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Secara garis besar ciri- ciri Pasar Rakyat yang sudah direvitalisasi berdasarkan SNI Pasar Rakyat adalah sebagai berikut :

- Kios tidak menutup arah angin dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus
- Fasilitas pasar bisa diakses oleh siapa saja termasuk lansia dan penyandang difabel
- Kios penjual dipisah sesuai dengan produk yang dijual, misalnya penjual sayuran berada di zonasi sayur, penjual daging berada di zonasi daging, dan lain-lain.
- Telah menyediakan tempat parkir motor atau mobil yang proporsional sesuai dengan luas pasar.
- Tersedianya tempat khusus merokok, tempat ibadah, toilet yang bersih, ruang menyusui, pos kesehatan, area berkumpul dan ruang terbuka hijau.
- Terdapat CCTV, pos keamanan dan kantor pengelolaan yang siap membantu dalam memperoleh informasi
- Pengelolaan sampah, limbah dan drainase yang baik dan terstruktur
- Tersedianya pos ukur ulang atau timbangan bagi para pembeli untuk mengukur ulang barang yang di belinya.

Dengan SNI Pasar Rakyat, pada akhirnya akan meningkatkan



perlindungan terhadap konsumen dan pendapatan para pedagangnya. Data terakhir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menunjukkan jumlah Pasar ber SNI yang ada di Provinsi Bali sebanyak 3 pasar yaitu : Pasar Nyanglan, Pasar Poh Gading, Pasar Agungyang memperoleh penghargaan sebagai pengelola pasar rakyat terbaik dari Kementerian Perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten/Kota se- Bali pada Tahun 2021 sebanyak 1.383 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali**

No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejarang	Non Jejarang	Berjejarang + Non Jejarang
1	Denpasar	50	201	44	245
2	Badung	65	190	44	234
3	Tabanan	14	148	236	384
4	Jembrana	10	20	36	56
5	Buleleng	91	54	15	69
6	Karangasem	20	14	51	65
7	Klungkung	27	10	86	96
8	Bangli	4	30	20	50
9	Gianyar	62	184	0	184
<b>TOTAL</b>		<b>343</b>	<b>851</b>	<b>532</b>	<b>1.383</b>

*Sumber Data: DISPERINDAG Provinsi Bali*

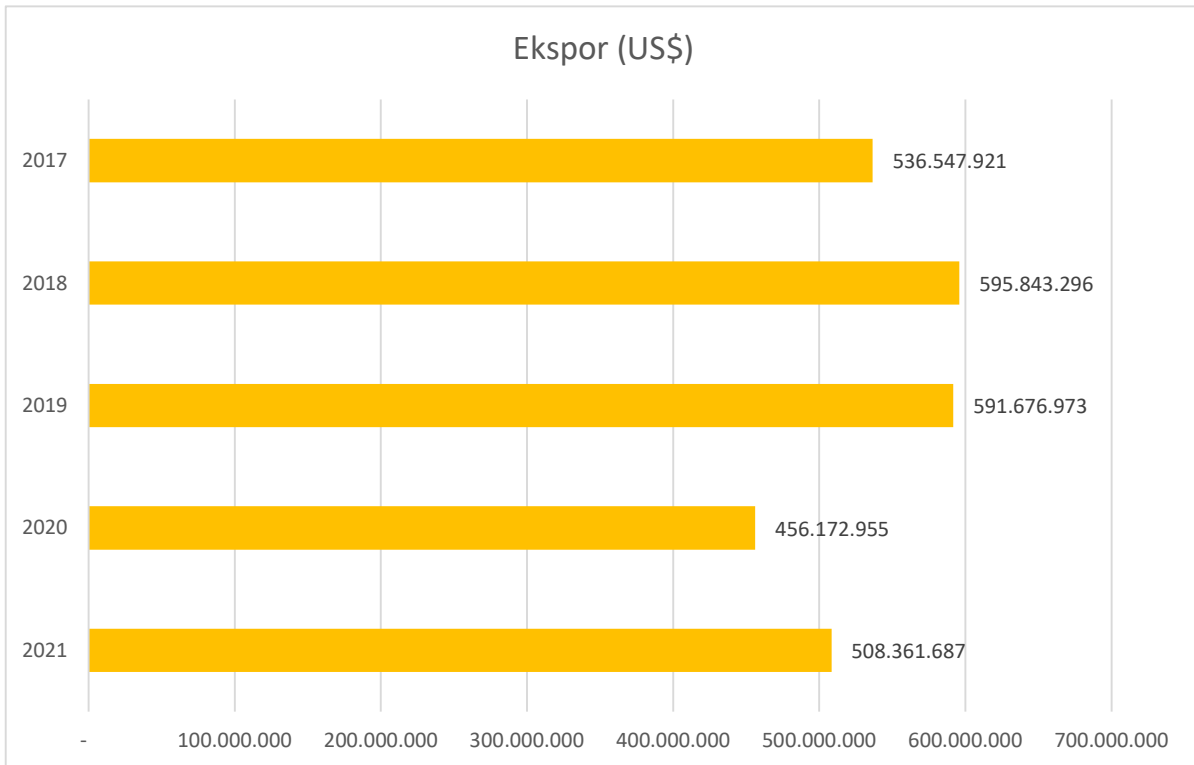
### 3. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali

Dengan diberlakukannya Asean Economic Community dan Perdagangan yang semakin bebas sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat untuk merebut Pasar Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di Negara-Negara Maju diikuti dengan pemberlakuan Non Tarif Barrier yang menyebabkan sulitnya menembus pasar global. Untuk mampu bersaing di pasar global maka kualitas desain dan kualitas produk Bali perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur pelabuhan laut untuk Pelayanan Ekspor juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing karena biaya logistik menjadi tinggi. Ekspor daerah Bali dalam 5 (lima) tahun terakhir belum optimal dan berfluktuasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :





**Grafik 3.3**  
**Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali**  
**Tahun 2017-2021**



*Sumber Data: BPS Provinsi Bali*

Nilai ekspor terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar US\$ 595.843.296. Dan mengalami penurunan paling tajam pada Tahun 2020 karena menurunnya permintaan pasar akibat COVID19 sebesar 20,70% (dengan nilai ekspor sebesar US\$ 456.172.955).

**Tabel 3.4**  
**Nilai Ekspor Bersih Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Ekspor	Neraca Perdagangan	Impor
2021	508.361.687	472.448.061	35.913.626
2020	456.172.955	372.284.122	83.888.833



Tahun	Ekspor	Neraca Perdagangan	Impor
2019	591.676.973	324.121.206	267.555.767
2018	595.843.296	328.601.913	267.241.383
2017	536.547.921	412.116.860	124.431.061

Sumber Data: BPS Provinsi Bali

#### 4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen

Setiap konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan terhadap barang beredar terutama membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, keterbatasan jumlah petugas pengawasan, belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Bali, serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya kesadaran pedagang dalam tertib berniaga sehingga masih banyak timbul kasus-kasus yang merugikan konsumen. Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tera/tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) menjadi kewenangan kabupaten/Kota yang semula kewenangan Provinsi. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang semula kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi. Sebagai tolok ukur, konsumen terlindungi hak- haknya dapat dilihat dari nilai indeks keberdayaan konsumen. Pada tahun tambah. Pada tahun 2019 untuk standarisasi produk pangan baru sampai pada tahap peningkatan mutu kemasan pangan. Dari 40 Industri produk olahan pangan yang dilatih baru 11 industri produk olahan pangan yang meningkat mutu kemasannya. Dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak hanya kemasannya saja yang bermutu dan menarik, tetapi olahan produk pangan yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dantambah. Pada tahun 2019 untuk standarisasi produk pangan baru sampai pada tahap peningkatan mutu kemasan pangan. Dari 40 Industri produk olahan pangan yang dilatih baru 11 industri produk olahan pangan yang meningkat mutu kemasannya. Dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak hanya kemasannya saja yang bermutu dan menarik, tetapi olahan produk pangan yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dantambah.



Pada tahun 2019 untuk standarisasi produk pangan baru sampai pada tahap peningkatan mutu kemasan pangan. Dari 40 Industri produk olahan pangan yang dilatih baru 11 industri produk olahan pangan yang meningkat mutu kemasannya. Dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak hanya kemasannya saja yang bermutu dan menarik, tetapi olahan produk pangan yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dantambah. Pada tahun 2019 untuk standarisasi produk pangan baru sampai pada tahap peningkatan mutu kemasan pangan. Dari 40 Industri produk olahan pangan yang dilatih baru 11 industri produk olahan pangan yang meningkat mutu kemasannya. Dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak hanya kemasannya saja yang bermutu dan menarik, tetapi olahan produk pangan yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dantambah. Pada tahun 2019 untuk standarisasi produk pangan baru sampai pada tahap peningkatan mutu kemasan pangan. Dari 40 Industri produk olahan pangan yang dilatih baru 11 industri produk olahan pangan yang meningkat mutu kemasannya. Dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak hanya kemasannya saja yang bermutu dan menarik, tetapi olahan produk pangan yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dan2017 nilai indeks keberdayaan konsumen sebesar 30,8 dan ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 2% setiap tahun, selama 5 (lima) tahun menjadi 33,88.

##### **5. Masih lemahnya daya saing produk industri**

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Bali tidak memiliki sumber tambang dan Sumber Daya Alam yang cukup, maka ketersediaan bahan baku industri masih kurang karena tergantung dari luar pulau bahkan dari luar negeri. Lemahnya daya saing juga dipengaruhi tingginya harga bahan baku perak, kayu, benang. Keterbatasan peralatan, kemampuan/keterampilan perajin dan yang tidak kalah pentingnya adalah masih sangat kurangnya promosi dan jejaring produk.



Perkembangan industri Daerah Bali dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2016-2021) rata-rata mengalami peningkatan unit usaha sebesar 1,5% per tahun, demikian juga dengan nilai tambah produk seperti terlihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 3.5**  
**Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah**



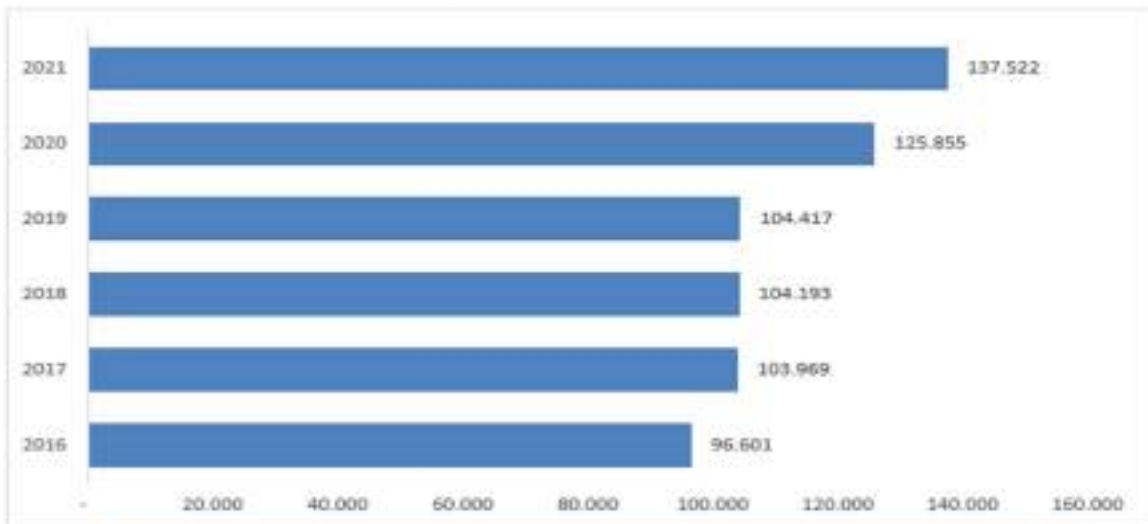
Sumber Data: Disperindag Bali



Grafik 3.6

Tenaga Kerja Sektor Industri Bali

PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI BALI



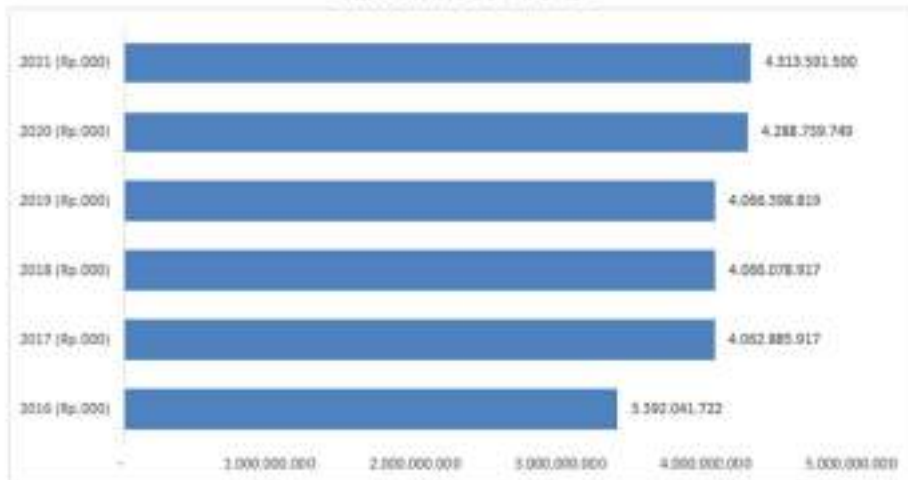
2016	2017	2018	2019	2020	2021
96.601	103.969	104.193	104.417	125.855	137.522

Sumber Data: Disperindag Bali

Grafik 3.7

Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri

PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI BALI



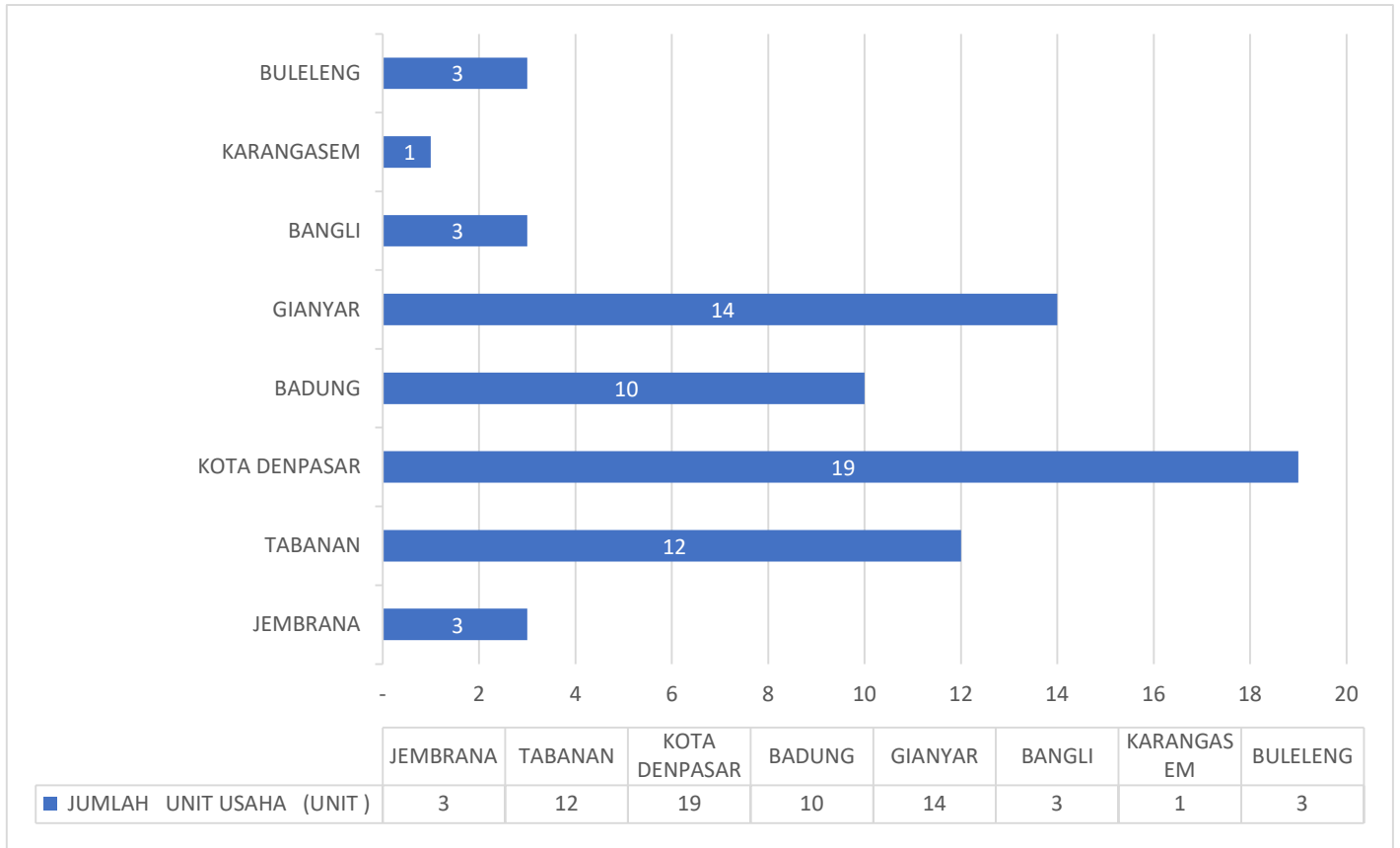
2016 (Rp.000)	2017 (Rp.000)	2018 (Rp.000)	2019 (Rp.000)	2020 (Rp.000)	2021 (Rp.000)
3.392.041.722	4.062.885.917	4.066.078.917	4.066.398.819	4.288.739.749	4.313.591.500

Sumber Data: Disperindag Bali



Mulai tahun 2017 sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan Provinsi adalah industri besar. Jumlah industri besar Provinsi Bali tahun 2017 sebanyak 57 unit usaha, jumlah industri besar per Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.8**  
**Data Industri Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2021**



Sumber Data: Disperindag Bali

Dari grafik tersebut di atas terlihat jumlah industri besar di Kota Denpasar menduduki peringkat pertama sebanyak 18 unit usaha, disusul Kabupaten Gianyar sebanyak 13 unit usaha, Kabupaten Tabanan 10 unit usaha, Kabupaten Badung sebanyak 9 unit usaha, Kabupaten Bangli sebanyak 3 unit usaha, Kabupaten Buleleng sebanyak 2 unit usaha, dan Kabupaten Jembrana sebanyak 1 unit usaha. Dari data tersebut diatas diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan jumlah industri besar mengalami perkembangan sebanyak 3 industri besar setiap tahunnya.



## 6. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor

Belum optimalnya pelayanan dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor disebabkan oleh masih rendahnya jumlah SDM Penguji Mutu Barang (PMB) serta peralatan yang memadai, sehingga perlu ditingkatkan Kembali, Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian diamanatkan bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

BPSMB merupakan salah satu lembaga penilaian yang dapat mempunyai kompetensi penguji mutu atas barang-barang beredar sesuai dengan standar yang ditetapkan, diharap peranannya akan makin ditingkatkan, sehingga kemampuannya untuk menilai kualitas barang beredar maupun untuk kebutuhan ekspor akan semakin baik.

UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan Lembaga Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang / Lembaga Penilaian Kesesuaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang menangani pengujian dan sertifikasi Mutu Barang, sesuai dengan SNI wajib serta ruang lingkup kewenangan, sesuai sertifikat akreditasi dari KAN dengan Nomor LP-553-IDN yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2020.





## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

##### Tujuan

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 disebutkan bahwa Visi Pemerintah Provinsi adalah; “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang dilandasi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali.

Berdasarkan kedua puluh dua Misi Kepala Daerah yang terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mendukung Misi Pertama **“Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali”** dan mengampu misi Ke enambelas yaitu **”Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas”** dan misi ke tujuh belas **“Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali”**.

Mengacu pada Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tahun 2018 – 2023, yaitu:

- a. Terwujudnya stabilitas harga barang pokok
- b. Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri
- c. Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri
- d. Meningkatnya daya saing produk industri Bali

##### **Sasaran Strategis**

- a. Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri
- b. Meningkatnya Daya Saing Industri
- c. Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

Berikut uraian target terhadap tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali kurun waktu lima tahun sebagai berikut



PEMERINTAH PROVINSI BALI



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	MENGUATNYA PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,97	9,05	9,26%	9%	9%
2	MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,04	6,44	6,70	6,04%	6,04%
3	MENINGKATNYA NILAI EKSPOR BERSIH	Persentase Nilai ekspor bersih	(1,38)%	12,94	21,20%	3%	3%



PEMERINTAH PROVINSI BALI



**Tabel 4.2**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Perubahan RPJMD (Tabel 7.2B) Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Provinsi Bali

NO	TUJUAN 4.2	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya stabilitas harga barang pokok	Terwujudnya stabilitas harga barang pokok	Persentase stabilitas harga barang Pokok	3,86%	4,10%	<10%	7%	7%
2	Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk lokal Bali	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	25%	25%	25%	25%	25%
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	32,8%	51,79%	36,8%	38,8%	40,8%
		Meningkatnya jumlah pasar yang ber-SNI	Jumlah Pasar ber SNI	4	4	4	6	6
3	Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Nilai ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	67,42%	64,95%	64,95%	64,95%	64,95%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.70%	81.85%	83%	84%	85%
4	Meningkatnya daya saing produk industri Bali	Meningkatnya Produktifitas produk industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	4,93%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
			Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%



PEMERINTAH PROVINSI BALI



Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang secara langsung diampu pada misi  
1, 16 dan 17 RPJMD Tabel 6.3 Semesta Berencana

NO	TUJUAN 4.3	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Meningkatnya Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	96 produk	111 produk	126 produk	141 produk	156 produk
		Meningkatnya produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %



NO	TUJUAN 4.3	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
		Meningkatnya pasar yang dikembangkan	Jumlah pasar yang dikembangkan	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar
		Meningkatnya toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bal	20 toko	40 toko	60 toko	80 toko	100 toko
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Pemberdayaan Konsumen	2%	2%	2%	2%	2%
2	Meningkatnya kualitas IKM branding bali berorientasi Ekspor	Meningkatnya Nilai ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	2%	2%	3%	4%	4%
		Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah barang yang tersertifikasi	45	48	50	53	56
		Meningkatnya industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	TUJUAN 4.3	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
		Meningkatnya Produsen produk sandang lokal Bali	Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	5 unit usaha	7unit usaha	9 unit usaha	11 unit usaha	13 unit usaha
		Berkembangnya komoditi Olahan Pangan	Jumlah komoditi olahan pangan yang tumbuh dan berkembang	5 produk olahan	7 produk olahan	9 produk olahan	10 produk olahan	12 produk olahan



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian mengacu kepada amanat pembangunan bangsa yang termuat dalam konstitusi, dengan menganut azas- azas yang diletakkan untuk menjamin terpenuhinya aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, teknologi dan keamanan, demi keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan kesejahteraan rakyat dan generasi bangsa di masa depan. Konsep dasar dari pengembangan industri regional dengan mengaitkan dan mensinergikan aspek utamanya yaitu menciptakan **kompetensi inti daerah**, ditunjang oleh kemampuan dalam melakukan regional marketing dan membangun jejaring (kerjasama antar daerah). Dengan konsep dasar ini diharapkan pembangunan industri di daerah dapat lebih efisien, efektif dan produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dan serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Kompetensi inti memenuhi kriteria diantaranya: (a) Memberikan akses potensial pada beragam pasar, (b) mampu memberikan yang signifikan bagi manfaat pelanggan produk akhir, dan (c) unik, sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Dengan membangun kompetensi inti daerah berarti pembinaan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berarti meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembangunan industri dan perdagangan harus mampu ikut menyumbang tercapainya keinginan dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Secara ekonomis, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materi bagi masyarakat luas





- b. Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana)
- c. Secara teknologi, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi bangsa di bidang teknologi dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing menghadapi era globalisasi / liberalisme ekonomi dunia.

Untuk mewujudkan tujuan sektor industri dan perdagangan dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bali maka ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan seperti tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

<b>Isu Strategis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya/ Produk lokal krama Bali yang menggunakan branding Bali yang terserap pasar</li> <li>2. Masih rendahnya jumlah pasar yang ada dibali yang memiliki Sertifikasi sebagai Pasar SNI (Standar Nasional Indonesia)</li> <li>3. Masih rendahnya perlindungan konsumen</li> <li>4. Masih rendahnya perkembangan industri kreatif</li> <li>5. Belum optimalnya ekspor industri kreatif ke manca negara</li> <li>6. Masih rendahnya kualitas olahan pangan</li> </ol>		
<b>Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali</b>			
<b>Misi 16 : Membangun dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai dengan Potensi Kab/Kota di Bali dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Arti Luas</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Meningkatnya daya saing ekonomi lokal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar</li> <li>2. Meningkatnya produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar</li> <li>3. Meningkatnya pasar yang dikembangkan</li> <li>4. Meningkatnya toko yang menyediakan produk sandang lokal bali</li> <li>5. Meningkatnya Perlindungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan promosi produk lokal melalui pameran.</li> <li>2. Meningkatkan kecintaan penggunaan produk local</li> <li>3. Meningkatnya kemitraan usaha</li> <li>4. Memperpendek mata rantai perdagangan</li> <li>5. Terjaganya stabilitas harga</li> <li>6. Meningkatnya jumlah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemasaran produk lokal</li> <li>2. Meningkatkan Sarana distribusi perdagangan</li> <li>3. Meningkatnya jumlah pasar yang ber-SNI</li> <li>4. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen</li> </ol>



	<p>Konsumen</p> <p>6. Meingkatkan Stabilitas harga kebutuhan bahan pokok.</p>	<p>pasar yang ber SNI</p> <p>7. Meningkatnya jumlah pasar yang di revitalisasi</p> <p>8. Meningkatnya jumlah pasar digital</p> <p>9. Meningkatnya jumlah toko yang menjual produk sandang lokal Bali</p> <p>10. Meningkatnya barang dan jasa yang beredar sesuai standar</p> <p>11. Meningkatnya konsumen cerdas</p>	<p>5. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar serta membentuk BPSK</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Misi 17 : Membangun dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor</p>	<p>1.Meningkatnya industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</p> <p>2.Meningkatnya Nilai ekspor industri kreatif</p> <p>3.Meningkatnya Produsen produk sandang lokal Bali</p> <p>4.Berkembangnya komoditi Olahan Pangan</p> <p>5.Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu Barang</p>	<p>1. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan Kompetensi Inti Daerahnya masing-masing.</p> <p>2. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku dan bahan penolong industri kerajinan.</p> <p>3. Memfasilitasi pemasaran teknologi industri</p> <p>4. Memfasilitasi permodalan, mesin dan peralatan serta fasilitasi insentif perijinan</p> <p>5. Pengembangan kelembagaan</p> <p>6. Standarisasi produk</p> <p>7. Pengembangan desain, Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, pendampingan</p>	<p>1. Mengembangkan Industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan Mutu, Desain dan Akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup</p> <p>2. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang</p>



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



		<p>8. Promosi dalam dan luar negeri</p> <p>9. Pelatihan, pendampingan olahan pangan serta fasilitasi dan pendampingan pendaftaran HKI</p> <p>10 Peningkatan SDM penguji mutu barang serta peningkatan sarana dan prasarana laboratorium</p>	<p>terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, Penyajian, Pelayanan Pelayanan serta penyebar luasan data dan informasi industry</p> <p>3. Memanfaatkan pemasaran digital yang berkualitas industri 4.0]</p> <p>4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedangkan sejalan dengan upaya mewujudkan Bali yang Nangun Sat Kerthi Loka Bali, maka strategi pengembangan industri dan perdagangan, diarahkan pada hal-hal yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali</b>			
<b>MISI 16 : Membangun dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai dengan Potensi Kab/Kota di Bali dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Arti Luas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar</li> <li>2. Meningkatnya produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar</li> <li>3. Meningkatnya pasar yang dikembangkan</li> <li>4. Meningkatnya toko yang menyediakan produk sandang lokal bali</li> <li>5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan promosi produk lokal melalui pameran.</li> <li>2. Meningkatkan kecintaan penggunaan produk local</li> <li>3. Meningkatnya kemitraan usaha</li> <li>4. Memperpendek mata rantai perdagangan</li> <li>5. Terjaganya stabilitas harga</li> <li>6. Meningkatnya jumlah pasar yang ber SNI</li> <li>7. Meningkatnya jumlah pasar yang di revitalisasi</li> <li>8. Meningkatnya jumlah pasar digital</li> <li>9. Meningkatnya jumlah toko yang menjual produk sandang lokal Bali</li> <li>10. Meningkatnya barang dan jasa yang beredar sesuai standar</li> <li>11. Meningkatnya konsumen cerdas</li> <li>12. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan tertib niaga</li> <li>13. Meningkatnya pelayanan sengketa konsumen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemasaran produk lokal</li> <li>2. Meningkatkan Sarana distribusi perdagangan</li> <li>3. Meningkatnya jumlah pasar yang ber-SNI</li> <li>4. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen</li> <li>5. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar serta membentuk BPSK</li> </ol>



<b>Misi 17 : Membangun dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali</b>			
Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</li> <li>2. Meningkatnya Nilai ekspor industri kreatif</li> <li>3. Meningkatnya Produsen produk sandang lokal Bali</li> <li>4. Berkembangnya komoditi Olahan Pangan</li> <li>5. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu Barang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan Kompetensi Inti Daerahnya masing-masing.</li> <li>2. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku dan bahan penolong industri kerajinan.</li> <li>3. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri</li> <li>4. Memfasilitasi permodalan, mesin dan peralatan serta fasilitasi insentif perijinan</li> <li>5. Pengembangan kelembagaan</li> <li>6. Standarisasi produk</li> <li>7. Pengembangan desain, Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, pendampingan</li> <li>8. Promosi dalam dan luar negeri</li> <li>9. Pelatihan, pendampingan olahan pangan serta fasilitasi dan pendampingan pendaftaran HKI</li> <li>10. Peningkatan SDM penguji mutu barang serta peningkatan sarana dan prasarana laboratorium</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan Mutu, Desain dan Akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.</li> <li>2. Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup</li> <li>3. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, Penyajian, Pelayanan, Pelayanan serta</li> </ol>



			<p>penyebar luasan data dan informasi industri</p> <p>4. Memanfaatkan pemasaran digital yang berkualitas industri 4.0</p> <p>5. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk kurun waktu 2018 - 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2023. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang secara langsung menunjukkan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Secara Terinci Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 pada Tabel 6.1 dan Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2019 pada Tabel 6.2 berikut ini



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tabel 6.1

Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 Sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>82,3</b>	<b>20.165.067.703</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Keluaran :</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  <b>Hasil :</b> Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu	3 Dokumen  100%	100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000	Kota Denpasar
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Keluaran :</b> Jumlah Sub Kegiatan pada Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan  <b>Hasil :</b> Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Sub Kegiatan  100%	12.373.267.581	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	12.373.267.581	Kota Denpasar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Keluaran :</b> Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Sub Kegiatan	1.299.428.844	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
		<b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.552.855	Kota Denpasar
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	994.484.379	Kota Denpasar
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.750.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.928.060	Kota Denpasar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.132.000	Kota Denpasar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	192.581.550	Kota Denpasar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan  <b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan  100%	946.757.385	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.500.000	Kota Denpasar

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.257.385	Kota Denpasar
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	Kota Denpasar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan  <b>Hasil</b> : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan  100%	4.000.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	Kota Denpasar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  <b>Hasil</b> : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Sub Kegiatan  100%	1.445.613.893	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.007.813.352	Kota Denpasar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	437.800.541	Kota Denpasar

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>85%</b>	<b>351.186.358</b>	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<b>Keluaran :</b> Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal)  <b>Hasil :</b> Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	14000 Dokumen  3%	351.186.358	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	351.186.358	Semua Kab/Kota
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Jumlah Pasar ber SNI</b>	<b>6</b>	<b>200.000.000</b>	
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<b>Keluaran :</b> Jumlah Pasar yang dibina  <b>Hasil :</b> Jumlah Laporan Pembinaan Pasar	8 Pasar  8 Laporan	200.000.000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8 Laporan	200.000.000	Semua Kab/Kota
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif</b>	<b>64,95%</b>	<b>299.999.930</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada	<b>Keluaran :</b> Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti Jumlah Pelaku Usaha yang di Bina	1 Kegiatan 27 Pelaku Usaha	299.999.930	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<b>Hasil</b> : Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	2 Pelaku Usaha		
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	27 Pelaku Usaha	50.000.000	Semua Kab/Kota
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi untuk Peningkatan Akses Pasarnya	2 Pelaku Usaha	249.999.930	Semua Kab/Kota
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Indeks Keberdayaan Konsumen</b>	<b>40,8</b>	<b>700.000.000</b>	
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<b>Keluaran</b> : Persentase Konsumen yang dilindungi  <b>Hasil</b> : Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	100%  100%	600.000.000	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	500.000.000	Semua Kab/Kota
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	7 LPKSM	50.000.000	Semua Kab/Kota

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	6 Pengaduan	50.000.000	Semua Kab/Kota
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<b>Keluaran :</b> Jumlah Pelaku usaha yang diawasi legalitas dan kegiatan distribusi Jumlah Produk yang diawasi  <b>Hasil :</b> Persentase pengawasan perlindungan konsumen dan tertib niaga	35 Pelaku Usaha  15 Produk  100%	100.000.000	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	90 Laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali</b>	<b>30%</b>	<b>140.000.000</b>	
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>Keluaran :</b> Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal bali Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan branding bali yang terserap pasar  <b>Hasil :</b> Persentase produk lokal bali terhadap	100 Toko 156 Produk   30%	140.000.000	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	9 Laporan	140.000.000	Semua Kab/Kota
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTIN</b>	<b>Persentase stabilitas harga barang pokok</b>	<b>&lt;7%</b>	<b>160.000.000</b>	
	Pengendalian Harga, dan stij barang kebutuhan pokok dan Barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	<b>Keluaran :</b> Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah  <b>Hasil :</b> Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok	15 Kali  <7%	60.000.000	
	Pemantauan Harga dab Stok Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhanpokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	232 Laporan	60.000.000	Semua Kab/Kota
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Keluaran :</b> Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya  <b>Hasil :</b> Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga	50 Pelaku Usaha  100%	100.000.000	
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen kelengkapan legalitas perizinan	35 Dokumen	100.000.000	Semua Kab/Kota



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</b>	<b>1,50%</b>	<b>10.525.000.000</b>	
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<b>Keluaran</b> : Persentase Industri yang dibina  <b>Hasil</b> : Persentase Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50%  1,50%	10.525.000.000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	25.000.000	Semua Kab/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	500.000.000	Semua Kab/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13 Dokumen	10.000.000.000	Semua Kab/Kota
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Industri</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<b>Keluaran :</b> Persentase Data Industri yang terkumpul  <b>Hasil :</b> Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	200.000.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270 Dokumen	200.000.000	Semua Kab/Kota
<b>TOTAL PAGU DINAS</b>				<b>32.741.253.991</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>82,3</b>	<b>2.131.287.386</b>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Keluaran :</b> Jumlah Sub Kegiatan pada Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan  <b>Hasil :</b> Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Sub Kegiatan	1.808.898.036	
			100%		

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/ Bulan	1.808.898.036	Kota Denpasar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan <b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Administrasi Umum	5 Sub Kegiatan  100%	139.389.350	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.548.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	95.395.550	Kota Denpasar
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.409.800	Kota Denpasar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.036.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan <b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan  100%	62.000.000	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	50.000.000	Kota Denpasar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Keluaran :</b> Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Hasil :</b> Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Sub Kegiatan  100%	121.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	121.000.000	Kota Denpasar
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Indeks Keberdayaan Konsumen</b>	<b>40,8</b>	<b>1.081.142.648</b>	
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<b>Keluaran :</b> Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan <b>Hasil :</b> indeks kepuasan masyarakat	55 Sertifikat  82%	1.081.142.648	
	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	55 Dokumen	1.081.142.648	Semua Kab/Kota
<b>TOTAL PAGU UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>				<b>3.212.430.034</b>	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>82,3</b>	<b>2.368.782.256</b>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan pada Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan <b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Sub Kegiatan  100%	1.969.619.360	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ Bulan	1.969.619.360	Kota Denpasar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan <b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Administrasi Umum	4 Sub Kegiatan  100%	235.560.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	225.000.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Kota Denpasar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.000.000	Kota Denpasar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.560.000	Kota Denpasar

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan  <b>Hasil</b> : Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan  100%	53.506.448	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	53.506.448	Kota Denpasar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  <b>Hasil</b> : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Sub Kegiatan  100%	110.096.448	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	110.096.448	Kota Denpasar
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</b>	<b>1,50%</b>	<b>150.000.000</b>	
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<b>Keluaran</b> : Persentase Industri yang dibina  <b>Hasil</b> : Persentase Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50%  1,50%	150.000.000	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Rencana Alokasi sesuai target kinerja tahun 2023	Usulan Pagu 2023	Lokasi Kegiatan
1	2	3	8	9	10
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000	Semua Kab/Kota





PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tabel 6.2  
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2021-2023 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Misi 16 : Membangun dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai dengan Potensi Kab/Kota di Bali dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Arti Luas</b>															
Meningkatkan daya saing ekonomi lokal	Branding Bali yang terserap pasar	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali		30%	49.999.910	30%	64.999.910	30%	75.000.000	30%		
			3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar		126 Produk	49.999.910	30%	64.999.910	30%	75.000.000	30%		
			3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali		126 Produk 60 Toko	49.999.910	141 Produk 80 Toko	64.999.910	156 Produk 100 Toko	75.000.000	156 Produk 100 Toko	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Meningkatnya Stabilitas harga kebutuhan	Persentase Peningkatan harga barang	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	Persentase Peningkatan harga barang Pokok		<10 %	137,475,548	7%	142,717,948	7%	150.000.000	7%		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
	bahan pokok.	Pokok		POKOK DAN BARANG PENTING											
			3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok kurang dari		<10 %	87.476.448	7%	92,718,848	7%	150.000.000	7%		
			3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Harga Jumlah pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar		240 Laporan 13 Kali	87.476.448	240 Laporan 13 Kali	92,718,848	240 Laporan 13 Kali	100.000.000	480 Laporan 26 Kali	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga		100%	49.999.100	100%	49.999.100	100%	50.000.000	100%		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
			3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya		25 Pelau Usaha	49.999.100	50 Pelaku Usaha	49.999.100	50 Pelaku Usaha	50.000.000	100 Pelaku Usaha	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI		2 Pasar	50.000.000	2 Pasar	85.000.000	2 Pasar	100.000.000	2 Pasar		
			3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dikembangkan		8 Pasar	50.000.000	8 Pasar	85.000.000	8 Pasar	100.000.000	8 Pasar		
			3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina		8 Pasar	50.000.000	8 Pasar	85.000.000	8 Pasar	100.000.000	8 Pasar	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen		2%	287,466,446	2%	733,961,928	2%	1.050.000.000	2%		
3.30.06.1.01			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Konsumen Cerdas		100%	137.476.298	100%	883.952.076	100%	850.000.000	100%			



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
			3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan pemahamannya tentang perlindungan konsumen Jumlah Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen		100 Orang	137.476.298	100 Orang 1 Tahun	683.962.048	100 Orang 1 Tahun	850.000.000	200 Orang 2 Tahun	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan		100%	49.999.880	100%	49.999.880	100%	50.000.000	100%		
			3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi		10 Produk	49.999.880	10 Produk	49.999.880	10 Produk	50.000.000	10 Produk	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
			3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan		55 Pengujian	149.990.148	55 Pengujian	149.990.148	55 Pengujian	150.000.000			
			3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang		55 Pengujian	149.990.148	55 Pengujian	149.990.148	55 Pengujian	150.000.000			
<b>Misi 17 : Membangun dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali</b>															
Meningkatkan kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor		Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang		1,50%	3,010,610,694	1,50%	4,586,237,324	1,50%	4,493,004,004	1,50%		
		Persentase Ketersediaan Data Industri	3.31.02.1.01	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	<i>Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</i>		1,50%	3,010,610,694	1,50%	4,493,004,004	1,50%	5.100.000.000	1,50%		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
			3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah perajin yang dibina dalam peningkatan mutu produk Jumlah perajin yang difasilitasi pameran Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh jumlah sentra industri sandang yang didamping jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan mutu kemasan		81Perajin 250 Perajin 10 Perajin 9 Unit Usaha 2 Sentra 20 Pelaku Usaha	3,010,610,694	81Perajin 150 Perajin 10 Perajin 9 Unit Usaha 2 Sentra 20 Pelaku Usaha	4,493,004,004	81Perajin 150 Perajin 10 Perajin 9 Unit Usaha 2 Sentra 20 Pelaku Usaha	5.000.000.000	162Perajin 300 Perajin 20 Perajin 18 Unit Usaha 4 Sentra 40 Pelaku Usaha	Bidang Perindustrian dan UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
					Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha  Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis mutu produk			20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha			
			3.31.02.1.01.05.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah RPIK yang di evaluasi Jumlah sentra industri agro yang didampingi		0	0	3 Kajian 3 Sentra	93,233,320	3 Kajian 3 Sentra	100.000.000	6 Kajian 6 Sentra	Bidang Perindustrian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Ketersediaan Data Industri		0	0	100%	167,689,640	100%	225.000.000	100%		





PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
			3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Sentra Industri Logam yang didampingi Jumlah terkumpulnya industri logam		0	0	2 Sentra 20 Industri	95,244,820	2 Sentra 20 Industri	100.000.000	4 Sentra 40 Industri	Bidang Perindustrian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Industri yang dipantau		0	0	45 Industri	72,444,820	45 Industri	125.000.000	90 Industri	Bidang Perindustrian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif		3 %	249.999.540	3 %	218,262,840	3 %	225.000.000	3 %		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya		4 pelaku usaha	249.999.540	4 pelaku usaha	218,262,840	4 pelaku usaha	225.000.000	8 pelaku usaha		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
				<i>Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</i>											
			3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran TEI		4 pelaku usaha	199.999.930	4 pelaku usaha	168,262,930	4 pelaku usaha	175,000,000	8 pelaku usaha	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi		27 Pelaku Usaha	49.999.610	27 Pelaku Usaha	49,999,910	27 Pelaku Usaha	50,000,000	54 Pelaku Usaha	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>		80.07 Indeks	430.858.098	80.07 Indeks	360,832,748	80.07 Indeks	425.000.000	80.07 Indeks		
			3.30.02.1.04	<i>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</i>	Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan		24500 Dokumen	380.858.688	7000 Dokumen	360,832,748	7000 Dokumen	425.000.000	3%		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023				
							Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
			3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir		24500 Dokumen	380.858.688	7000 Dokumen	300,833,138	7000 Dokumen	350,000,000	14.000 Dokumen	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			3.30.02.1.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisasi		50 Importir	49.999.410	50 Importir	59,999,610	50 Importir	75.000.000	100 Importir	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tabel 6.3

Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2020-2023

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan									Lokasi
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Meningkatnya Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar		Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	90	111 Produk	1.000.000.000,00	126 Produk	1.100.000.000,00	141 Produk	1.200.000.000,00	156 Produk	1.300.000.000,00	156 Produk	
			Peningkatan Pemasaran Produk Lokal Bali	Jumlah Produk yang dipromosikan		15 produk	600.000.000	15 produk	700.000.000	15 produk	800.000.000	15 produk	900.000.000	15 produk	Dalam dan Luar Daerah
			Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok/Operasi Pasar	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar		44 Kali	200.000.000	44 Kali	200.000.000	44 Kali	200.000.000	44 Kali	200.000.000	44 Kali	Dalam dan Luar Daerah
			Forum Dagang Produk Lokal Bali	Jumlah Produk Lokal bali yang difasilitasi pemasarannya		4 Produk	200.000.000,	4 Produk	200.000.000,	4 Produk	200.000.000,	4 Produk	200.000.000,	4 Produk	200.000.000,
		Meningkatnya produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar		Penguatan distribusi produk lokal	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	20	25%	30%	35%	40%	40%				



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi		
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Peningkatan Kemitraan Usaha	Jumlah temu usaha		4 Kali	500.000.000	4 Kali	550.000.000	4 Kali	600.000.000	4 Kali	650.000.000	4 Kali	Luar Daerah		
Meningkatnya pasar yang dikembangkan	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar yang dikembangkan	8	8	330.000.000,00	8	380.000.000,00	8	435.000.000,00	8	490.000.000,00	8				
					Peningkatan dan Pengembangan Sentra Pemasaran Produk Kerajinan	Jumlah Pembinaan Sentra Pemasaran Produk Kerajinan		2 Kali	80.000.000	2 Kali	80.000.000	2 Kali	85.000.000	2 Kali	90.000.000	2 Kali	Kabupaten /Kota
					Peningkatan Penataan Pasar Hasil Pertanian	Jumlah terbinanya pasar hasil pertanian		9 Pasar	150.000.000	9 Pasar	175.000.000	9 Pasar	200.000.000	9 Pasar	225.000.000	9 Pasar	Kabupaten /Kota
					Peningkatan Pasar Rakyat yang ber SNI Pasar	Jumlah terbinanya pasar rakyat yang ber SNI Pasar		1 Pasar	100.000.000	1 Pasar	125.000.000	1 Pasar	150.000.000	1 Pasar	175.000.000	1 Pasar	Kabupaten /Kota
Meningkatnya toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	Peningkatan aksesibilitas produk sandang lokal Bali		Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	20	40	150.000.000	60	175.000.000	80	200.000.000	100	225.000.000	100				
					Peningkatan pemasaran sandang lokal bali	Jumlah Toko yang menyediakan produk sandang lokal bali		40 Toko	150.000.000	40 Toko	175.000.000	40 Toko	200.000.000	40 Toko	225.000.000	40 Toko	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Program Perlindungan Konsumen		Indeks Pemberdayaan Konsumen	-	2%	1.550.000.000,00	2%	1.800.000.000,00	2%	2.050.000.000,00	2%	2.300.000.000,00	2%				
					Peningkatan Penerapan Tertib Niaga	Jumlah pelaku usaha yang dibina		90 Pelaku Usaha	125.000.000	90 Pelaku Usaha	125.000.000	90 Pelaku Usaha	125.000.000	90 Pelaku Usaha	125.000.000	90 Pelaku Usaha	Kabupaten/ Kota



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan									Lokasi
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Peningkatan Pengawasan Barang Beredar	Jumlah Produk yang diawasi		16 produk ber SNI	225.000.000	16 produk ber SNI	225.000.000	16 produk ber SNI	225.000.000	16 produk ber SNI	225.000.000	16 produk ber SNI	Kabupaten/ Kota
			Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Sengketa Konsumen yang ditangani		20 Kasus	1.000.000.000	20 Kasus	1.200.000.000	20 Kasus	1.400.000.000	20 Kasus	1.600.000.000	20 Kasus	Denpasar
			Peningkatan Edukasi Perlindungan Konsumen	Jumlah konsumen yang diedukasi		225 Orang	200.000.000	225 Orang	250.000.000	225 Orang	300.000.000	225 Orang	350.000.000	225 Orang	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kualitas IKM Branding Bali Berorientasi Ekspor	Meningkatnya Nilai ekspor industri kreatif		Peningkatan ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	2	2%	3.300.000.000,00	3%	3.550.000.000,00	4%	3.800.000.000,00	4%	4.050.000.000,00	4%	
			Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Pelayanan Dokumen SKA		24.500 Dokumen	800.000.000	24.500 Dokumen	850.000.000	24.500 Dokumen	900.000.000	24.500 Dokumen	950.000.000	24.500 Dokumen	Kabupaten /Kota
			Desiminasi Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Eksportir yang mengikuti Desiminasi Surat Keterangan Asal (SKA)		100 Eksportir	500.000.000	100 Eksportir	550.000.000	100 Eksportir	600.000.000	100 Eksportir	650.000.000	100 Eksportir	Kabupaten /Kota
			Peningkatan Pemasaran Produk Berorientasi Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang dipromosikan dan difasilitasi misi dagang		14 Pelaku Usaha	1.500.000.000	14 Pelaku Usaha	1.600.000.000	14 Pelaku Usaha	1.700.000.000	14 Pelaku Usaha	1.800.000.000	14 Pelaku Usaha	Dalam dan Luar Negeri
			Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan ekspor dan jumlah importir		200 Pelaku Usaha	500.000.000	200 Pelaku Usaha	550.000.000	200 Pelaku Usaha	600.000.000	200 Pelaku Usaha	650.000.000	200 Pelaku Usaha	Kabupaten /Kota



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				yang diawasi											
	Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu Barang		Program pengembangan pelayanan pengujian	Jumlah barang yang tersertifikasi	45	48	858.504.500,00	50	965.586.950,00	53	783.419.945,00	56	861.762.039,99	46	
			Penyediaan jasa surat – menyurat	Jumlah surat – menyurat yang diselesaikan		320 Lembar	1.900.000,00	320 Lembar	2.262.700,00	320 Lembar	2.488.970,00	320 Lembar	2.737.867,00	320 Lembar	Denpasar
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar		3 Jenis	80.000,00	3 Jenis	78.650,00	3 Jenis	86.515,00	3 Jenis	95.166.600,00	3 Jenis	Denpasar
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		1 Paket	37.500,00	1 Paket	46.585,00	1 Paket	51.243,50	1 Paket	56.367.850,00	1 Paket	Denpasar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		40 Jenis	20.000,00	38 Jenis	30.250,00	38 Jenis	33.275,00	38 Jenis	36.602.500,00	38 Jenis	Denpasar
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandaan, dan difotocopy		2 Jenis, 20 Buku, 8700 Lembar	3.000,00	2 Jenis, 20 Buku, 8700 Lembar	3.502.950,00	2 Jenis, 20 Buku, 8700 Lembar	3.853.245,00	2 Jenis, 20 Buku, 8700 Lembar	4.238.569,00	2 Jenis, 20 Buku, 8700 Lembar	Denpasar
			Penyediaan	Jumlah alat listrik		8 Jenis	1.750,00	8 Jenis	2.528.900,00	8 Jenis	2.781.790,00	8 Jenis	3.059.969,00	8 Jenis	Denpasar





PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Lokasi	
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	dan lampu penerangan		000,00									
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan yang disediakan	2 Jenis	2.900.000,00	2 Jenis	3.859.900,00	2 Jenis	4.245.890,00	2 Jenis	4.670.479,00	2 Jenis	Denpasar	
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 Jenis perjalanan dinas	33.000.000,00	1 Jenis perjalanan dinas	39.930.000,00	1 Jenis perjalanan dinas	43.923.000,00	1 Jenis perjalanan dinas	48.315.300,00	1 Jenis perjalanan dinas	Denpasar	
			Upacara keagamaan	Jumlah jenis sarana dan prasarana upacara agama	5 Jenis	25.000.000,00	5 Jenis	30.250.000,00	5 Jenis	33.275.000,00	5 Jenis	36.602.500,00	5 Jenis	Denpasar	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 Unit	90.000.000,00	3 Unit	113.195.500,00	3 Unit	124.515.050,00	3 Unit	136.966.550,00	3 Unit	Denpasar	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara	35 Unit, 1 Paket	45.000.000,00	22 Unit, 1 Paket	69.575.000,00	22 Unit, 1 Paket	76.532.500,00	22 Unit, 1 Paket	84.185.750,00	22 Unit, 1 Paket	Denpasar	
			Pemeliharaan rutin/berkala taman	Taman dan tempat parkir yang	1 Lokasi	60.000.000,00	1 Lokasi	72.600.000,00	1 Lokasi	79.860.000,00	1 Lokasi	87.846.000,00	1 Lokasi	Denpasar	



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Lokasi	
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			dan tempat parkir	dipelihara											
			Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan		16 Jenis	25.000.000,00	16 Jenis	33.275.000,00	16 Jenis	33.275.000,00	16 Jenis	36.602.500,00	16 Jenis	Denpasar
			Pengadaan peralatan laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan laboratorium		2 Unit	283.454.500,00	-	-	-	-	-	-	-	Denpasar
			Agreditasi laboratorium dan kaji ulang dokumen	Jumlah ruang lingkup komoditi yang diagreditasi		3 Komoditi (kopi, panili, kakao)	150.000.000,00	3 Komoditi (kopi, panili, kakao)	188.760.000,00	3 Komoditi (kopi, panili, kakao)	207.636.000,00	3 Komoditi (kopi, panili, kakao)	228.399.600,00	3 Komoditi (kopi, panili, kakao)	Denpasar
Meningkatnya produsen produk sandang lokal bali			<b>Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali</b>	<b>Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh</b>	5	7 Unit Usaha	500.000.000	9 Unit Usaha	600.000.000	11 Unit Usaha	650.000.000	13 Unit Usaha	700.000.000	13 Unit Usaha	
			Pengembangan Industri Tenun	Jumlah unit usaha industri tenun yang meningkat		5 Industri	500.000.000	5 Industri	600.000.000	5 Industri	650.000.000	5 Industri	700.000.000	5 Industri	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya industri kreatif yang tumbuh dan berkembang			<b>Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat</b>	<b>Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</b>	1,5	1.5%	<b>3.290.630.000,00</b>	1.5%	3.510.000.000	1.5%	3.540.000.000	1.5%	4.220.000.000	7.5%	
			Pendataan Industri di Bali	Jumlah buku data industri di Bali		10 Buku	50.000.000,00	10 Buku	100.000.000	10 Buku	150.000.000	10 Buku	200.000.000	10 Buku	Kabupaten/ Kota



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Lokasi	
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pameran Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah perajin yang mengikuti pameran		215 perajin	290.000.000,00	215 perajin	300.000.000,00	215 perajin	325.000.000,00	215 perajin	350.000.000,00	215 perajin	Denpasar
Berkembangnya Komoditi Olahan Pangan			Pengembangan Produk Industri Unggulan	Jumlah perajin yang dibina dan mengikuti pameran		121 Perajin, 45 Perajin	2.870.630.000,00	121 Perajin, 45 Perajin	3.000.000.000	121 Perajin, 45 Perajin	3.250.000.000,00	121 Perajin, 45 Perajin	3.500.000.000,00	121 Perajin, 45 Perajin	Dalam dan Luar Daerah
			Pengawasan Industri Pangan	Jumlah industri pangan yang dibina dan diawasi.		33 Industri	80.000.000,00	36 industri	110.000.000	39 industri	140.000.000,00	42 industri	170.000.000,00	42 industri	Kabupaten/ Kota
			<b>Program penumbuhan dan pengembangan industri olahan pangan</b>	<b>Jumlah komoditi olahan pangan yang tumbuh dan berkembang</b>	-	7 Produk Olahan	<b>722.220.000,00</b>	Produk Olahan	<b>757.583.500,00</b>	10Produk Olahan	<b>845.930.850,00</b>	12 Produk Olahan	<b>965.723.435,00</b>	12 Produk Olahan	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan		350 lembar	1.800.000	255 lembar	1.815.000	255 lembar	1.996.500	255 lembar	2.196.150	255 lembar	Denpasar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		21 jenis	16.500.000	21 Jenis	18.150.000	21 Jenis	19.965.000,00	21 Jenis	21.961.000,00	21 Jenis	Denpasar
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang yang d cetak, digandaan dan di fotocopy		2 buku, 20000 lembar	8.250.000	4 buku, 8 buku,, 20050 Lembar	9.075.000	4 buku, 8 buku,, 20050 Lembar	9.982.500,00	4 buku, 8 buku,, 20050 Lembar	10.980.750,00	4 buku, 8 buku,, 20050 Lembar	Denpasar
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		2 jenis	5.500.000	2 jenis	6.050.000	2 jenis	6.655.000,00	2 jenis	7.320.500,00	2 jenis	Denpasar	



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Lokasi	
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			undangan												
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		470 kotak	8.800.000,00	470 kotak	9.000.000,00	470 kotak	10.000.000,00	470 kotak	11.000.000,00	470 kotak	Denpasar
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah		2 jenis perjalanan	49.500,00	2 jenis perjalanan	54.450,00	2 jenis perjalanan	59.895,00	2 jenis perjalanan	65.884,500,00	2 jenis perjalanan	Denpasar
			Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan Gedung kantor		1 paket	55.000,00	1 paket	60.500,00	1 paket	66.550,00	1 paket	73.205,000	1 paket	Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		2 unit	85.000,00	2 unit	96.800,00	2 unit	106.480,00	2 unit	117.128,00	2 unit	Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara		3 unit	3.330.000,00	3 unit	5.757.500,00	3 unit	6.322.250,00	3 unit	6.954.475,00	3 unit	Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara		11 unit	8.540.000,00	11 unit	7.986.000,00	11 unit	8.784.600,00	11 unit	9.663.060,00	11 unit	Denpasar



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pengadaan perlengkapan unit pelayanan	Jumlah perlengkapan unit pelayanan kemasan yang tersedia		12 jenis	100.000.000,00	12 jenis	121.000.000.000,00	12 jenis	133.100.000,00	12 jenis	146.510.000	12 jenis	Denpasar
			Penerapan hak kekayaan intelektual pada produk industry olahan pangan	Jumlah industry yang mengikuti sosialisasi kekayaan intelektual		40 industri	110.000.000,00	40 industri	121.000.000,00	40 industri	133.100.000,00	40 industri	146.510.000	40 industri	Kabupaten/ Kota
			Peningkatan mutu produk industry olahan pangan	Jumlah industry olahan pangan yang mendapat pendampingan		40 industri	160.000.000,00	40 IKM	121.000.000,00	40 IKM	133.100.000,00	40 IKM	146.410.000,00	40 IKM	Kabupaten/ Kota
			Peningkatan mutu kemasan industry olahan pangan	Jumlah industry olahan pangan mengikuti sosialisasi kemasan		40 industri	110.000.000,00	40 industri	125.000.000,00	40 industri	150.000.000,00	40 industri	200.000.000,00	40 industri	Kabupaten/ Kota



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			<b>Program peningkatan akuntabilitas Capaian Kinerja</b>	<b>Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)</b>	N/A	82,1	3.463.200.000,00	82,1	3.402.520.000,00	82,1	4.408.272.000,00	82,1	4.849.099.200,00	82,1	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan		200 lembar	3.300.000	200 lembar	3.630.000	200 lembar	3.993.000	200 lembar	4.392.300	200 lembar	Denpasar
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar		3 Jenis	278.300.000	3 Jenis	306.130.000	3 Jenis	336.743.000	3 Jenis	370.417.300	3 Jenis	Denpasar
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		1 Paket	209.000.000	1 Paket	229.900.000	1 Paket	252.890.000	1 Paket	278.179.000	1 Paket	Denpasar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		61 Jenis	80.300.000	61 Jenis	88.330.000	61 Jenis	97.163.000	61 Jenis	106.879.300	61 Jenis	Denpasar
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandaan, dijilid, dan difotocopy		8 Jenis, 65 Buku, 61 Lembar, 63.800 Lembar	33.000.000	8 Jenis, 65 Buku, 61 Lembar, 63.800 Lembar	36.300.000	8 Jenis, 65 Buku, 61 Lembar, 63.800 Lembar	39.930.000	8 Jenis, 65 Buku, 61 Lembar, 63.800 Lembar	43.923.000	8 Jenis, 65 Buku, 61 Lembar, 63.800 Lembar	Denpasar
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan		5 Jenis	5.500.000	5 Jenis	6.050.000	5 Jenis	6.655.000	5 Jenis	7.320.500	5 Jenis	Denpasar
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – uundangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		4 Jenis	11.000.000	4 Jenis	12.100.000	4 Jenis	13.310.000	4 Jenis	14.641.000	4 Jenis	Denpasar
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		2050 kotak	25.300.000	2050 kotak	27.830.000	2050 kotak	30.613.000	2050 kotak	33.674.300	2050 kotak	Denpasar



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Lokasi	
						Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah		2Jenis	440.000.000	2Jenis	484.000.000	2Jenis	532.400.000	2Jenis	585.640.000	2Jenis	Denpasar
			Upacara Keagamaan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Upacara Agama		6 Jenis	82.500.000	6 Jenis	90.750.000	6 Jenis	99.825.000	6 Jenis	109.807.500	6 Jenis	Denpasar
			Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 Paket	550.000.000	1 Paket	605.000.000	1 Paket	665.500.000	1 Paket	732.050.000	1 Paket	Denpasar
			Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 Paket	550.000.000	1 Paket	605.000.000	1 Paket	665.500.000	1 Paket	732.050.000	1 Paket	Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara		2 Unit	275.000.000	2 Unit	302.500.000	2 Unit	332.750.000	2 Unit	366.025.000	2 Unit	Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		15 Unit	770.000.000	15 Unit	847.000.000	15 Unit	931.700.000	15 Unit	1.024.870.000	15 Unit	Denpasar
			Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	Jenis dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja		6 Jenis	165.000.000	6 Jenis	181.500.000	6 Jenis	199.650.000	6 Jenis	219.615.000	6 Jenis	Denpasar
			Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Buku Informasi Publik		100 Buku	165.000.000	100 Buku	181.500.000	100 Buku	199.650.000	100 Buku	219.615.000	100 Buku	Denpasar





PEMERINTAH PROVINSI BALI



Tabel 6.4

Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>						
			<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>sentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Pangan</b>	4,6%	<10%	97.178.000		
			Pasar Murah/Operasi Pasar	Jumlah Pasar Murah/Operasi Pasar per tahun		11 kali	40.000.000		kabupaten/kota
			Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pelaku Usaha Distribusi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Rapat Koordinasi Regulasi		50 Orang	28.588.000		Denpasar
			Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Unggulan Daerah di Toko Swalayan		1 Kali	28.590.000		Denpasar
			<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Peningkatan Nilai Ekspor</b>	20,47%	2%	426.600.000		
			Pemasaran Produk Unggulan Daerah Bali	Jumlah Pelaksanaan Promosi		1 Kali	176.600.000		Dalam dan Luar Daerah
			<b>Pengendalian Impor</b>	Jumlah pengawasan		100 Importir	50.000.000		Kabupaten/



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				terhadap importir					Kota se Bali
			Peningkatan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Eksportir yang mendapat pelayanan		531 Eksportir, 10 Kasus	200.000.000		Kabupaten/ Kota se Bali
			<b>Program Perlindungan Konsumen</b>	<b>Indeks Keberdayaan Konsumen</b>	-	<b>2%</b>	<b>115.000.000,00</b>		
			Peningkatan Penerapan Tertib Niaga	Jumlah pelaku usaha yang dibina		30 Pelaku Usaha	35.000.000,00		Kabupaten/Kota se Bali
			Peningkatan Pengawasan terhadap barang yang beredar	Jumlah produk ber SNI yang diawasi		14 produk ber SNI	45.000.000,00		Kabupaten/Kota se Bali
			Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK )	Pembentukan SK Pansel dan Seleksi Anggota BPSK		15 Orang	35.000.000,00		Kabupaten/Kota se Bali
			<b>Program peningkatan akuntabilitas Capaian Kinerja</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	82,1	82,1	<b>2.073.653.000</b>		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan		200 lembar	2.000.000		Denpasar
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar		3 Jenis	200.000.000		Denpasar
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		1 Paket	160.000.000		Denpasar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		61 Jenis	73.000.000		Denpasar
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandaan, dijilid, dan difotocopy		8 Jenis, 65 Buku, 61 Lembar, 63.800 Lembar	30.000.000		Denpasar
			Penyediaan komponen instalasi	Jumlah alat listrik dan		5 Jenis	5.000.000		Denpasar



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			listrik/penerangan bangunan kantor	lampu penerangan					
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – uundangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		4 Jenis	10.000.000		Denpasar
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		2050 kotak	23.000.000		Denpasar
			Rapat – rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah		2Jenis	443.676.150		Dalam dan Luar Daerah
			Upacara Keagamaan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Upacara Agama		6 Jenis	75.000.000		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara		2 Unit	152.353.832		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		15 Unit	504.364.000		Denpasar
			Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	Jenis dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja		6 Jenis	54.335.850		Dalam dan Luar Daerah
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		48 Unit	268.523.168,		Denpasar
			Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Buku Informasi Publik		25 Buku	13.000.000		Denpasar
			<b>Program pengembangan pelayanan penguji Mutu Barang</b>	<b>Jumlah barang yang tersertifikasi</b>	45	45	<b>486.995.000</b>		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan jasa surat – menyurat	Jumlah surat – menyurat yang diselesaikan		320 Lembar	1.700.000		Denpasar
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar		3 Jenis	65.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		1 Paket	35.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		38 Jenis	18.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandaan, dan difotocopy		2 Jenis, 20 Buku, 8700 Lembar	2.895.000,00		Denpasar
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan		8 Jenis	1.500.000		Denpasar
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		2 Jenis	2.900.000,00		Denpasar
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		1 Jenis perjalanan dinas	30.000.000,00		Denpasar



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			daerah						
			Upacara keagamaan	Jumlah jenis sarana dan prasarana upacara agama		5 Jenis	25.000.000,00		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		3 Unit	90.000.000,00		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara		22 Unit, 1 Paket	35.000.000		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir	Taman dan tempat parkir yang dipelihara		1 Lokasi	60.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan		16 Jenis	20.000.000,00		Denpasar
			Agreditasi laboratorium dan kaji ulang dokumen	Jumlah ruang lingkup komoditi yang diagreditasi		3 Komoditi (kopi, panili, kakao)	100.000.000,00		Denpasar
			<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>						
			<b>Program Pengembangan Industri</b>	<b>Indeks Peningkatan Produksi</b>	-	3.5%	<b>3.595.690.000,00</b>		
			Pengembangan Produk Industri Unggulan	Jumlah Perajin yang dibina dan mengikuti pameran		121 Perajin, 45 perajin	2.870.630.000,		Dalam dan Luar Daerah
			Pameran Pada Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah Perajin yang mengikuti pameran PKB		215 Perajin	290.000.000		9 Kabupaten/ Kota



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pendataan Industri di Bali	Jumlah Buku Data Industri Bali		10 Buku	50.000.000		9 Kabupaten/ Kota
			Pembinaan pengawasan industri pangan	Jumlah industri pangan yang dibina dan diawasi		35 Industri	50.000.000		9 Kabupaten/ Kota
			Temu Bisnis Produk Industri	Jumlah Temu Bisnis yang dilaksanakan		2 Kali	167.530.000		9 Kabupaten/ Kota
			Temu Bisnis Produk Industri	Jumlah Fasilitas Bahan Baku Kerajinan		2 Jenis	167.300.000		9 Kabupaten/ Kota
			<b>Program penumbuhan dan pengembangan industri olahan pangan</b>	<b>Jumlah komoditi olahan pangan yang tumbuh dan berkembang</b>	-	<b>5</b>	<b>523.350.000</b>		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan		255 lembar	1.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		21 Jenis	10.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang yang d cetak, digandaan dan di fotocopy		4 buku, 8 buku,, 20050 Lembar	5.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		2 jenis	3.000.000,00		Denpasar
			Penyediaan makanan dan	Jumlah makanan dan		200 kotak	3.500.000,00		Denpasar



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan			Lokasi
						Tahun ke-1		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			minuman	minuman yang disediakan					
			Pemeliharaan rutin/berkalat kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		2 unit	68.814.000,00		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara		3 unit	750.000,00		Denpasar
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara		11 unit	4.800.000,00		Denpasar
			Peningkatan mutu produk industri olahan pangan	Jumlah industry olahan pangan yang mendapat pendampingan		40 IKM	100.000.000,00		Kabupaten/Kota





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dalam bentuk kinerja nyata yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang masing-masing perangkat daerah. Perubahan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2018 - 2023 merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan perdagangan dan perindustrian untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Bali. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2023. Rumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut :



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,01%	8,01%	8,02%	8,03%	8,04%	8,05%	8,05%
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	28.39%	2,44%	2,6%	2,75%	2,85%	3%	3%
	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	15.09%	18.87%	22.64%	26.41%	30.19%	33.96%	33.96%
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	6,06%	6,06%	6,07%	6,08%	6,09%	6,10%	6,10%
	Cakupan Bina Perajin(%)	3.35%	3.50%	3.46%	3.78%	3.91%	4.04%	4.04%

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2018 - 2023 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023, sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Bali.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi Perubahan Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan di bidang industri dan bidang perdagangan.

**Tabel 8.1**  
**Daftar Revisi Renstra**

<b>BAB</b>	<b>HALAMAN</b>	<b>URAIAN</b>
II	2	Perubahan struktur organisasi
	13	Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
	16	Update data perkembangan PAD Disperindag
	19	Penambahan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai Dengan Tahun 2019
	21	Penambahan data Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku /Bahan Penolong Industri Kecil dan Menengah
	23	Penambahan data Perkiraan Posisi Stok/Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Provinsi Bali Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2021
	24	Penambahan data Koneksitas Barang-barang Kebutuhan Pokok (Oktober s/d Desember 2021)
	26	Revisi Data Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2016 – 2021 Menggunakan Data BPS Provinsi Bali
	28	Revisi Data Realisasi Impor Bali tahun 2016 – 2021 Menggunakan Data BPS Provinsi Bali
III	44	Update Penentuan Isu-Isu Strategis
IV	57	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	58	Perubahan pada Cascading Eselon II
V	62	Update Strategi Dan Arah Kebijakan
VI	70	Penambahan Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021